



**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2023-2026**

**JAYA RAYA**

**DINAS PENDIDIKAN**

**PROVINSI DKI JAKARTA**

**TAHUN 2022**

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta Tahun 2023 – 2026 ini merupakan dokumen yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan 2026 sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang sesuai Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan secara strategis. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap SKPD wajib menyusun Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jakarta Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berisi antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan indikator-indikator capaian kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor internal baik berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat berpengaruh terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga mempertimbangkan masukan dan pendapat dari banyak pemangku kepentingan melalui beberapa forum yang telah diselenggarakan. Harapan kami kiranya Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 ini, dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya pada kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dan apabila terdapat beberapa program ataupun kegiatan yang tidak tercapai atau teralokasi anggarannya pada tahun itu, kiranya dapat diprogramkan pada tahun berikutnya sesuai target yang direncanakan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 sehingga dapat selesai, tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

The image shows a circular official stamp of the Provincial Government of Jakarta, Department of Education. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA" around the top edge and "DINAS PENDIDIKAN" around the bottom edge. In the center, there is a logo with a scale of justice and a book, with the words "JAYA RAYA" above it. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Nahdiana

NIP 196908061992012001

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	II-1
2.1.1 Tugas .....	II-1
2.1.2 Fungsi .....	II-1
2.1.3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan .....	II-2
2.2 Sumber Daya SKPD.....	II-23
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	II-23
2.2.2 Aset/Modal dan Pelayanan .....	II-27
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD (2017-2021).....	II-32
2.3.1 Capaian Indikator Kerja .....	II-32
2.3.2 Realisasi Anggaran .....	II-47
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	II-48
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	III-1
3.2 Telaahan Resntra K/L .....	III-9
3.3 Analisis Dampak Rencana Tata Ruang dan Wilayah .....	III-29
3.4 Target Sustainable Development Goals (SDGs).....	III-42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....	IV-1
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan.....	IV-1
4.1.1 Visi.....	IV-1
4.1.2 Misi.....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pendidikan .....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-1

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## Daftar Gambar

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta.....	2
Gambar 2	Angka Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta .....	33
Gambar 3	Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	34
Gambar 4	Angka Partisipasi Kasar PAUD di DKI Jakarta .....	35
Gambar 5	Tren Angka Putus Sekolah DKI Jakarta .....	36
Gambar 6	APK Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah DKI Jakarta .....	37
Gambar 7	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI .....	38
Gambar 8	APM SMA/MA dan SMK DKI Jakarta .....	39
Gambar 9	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Di Jakarta.....	40
Gambar 10	Persentase Sekolah Negeri yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.....	42
Gambar 11	Persentase Sekolah Terakreditasi A.....	42
Gambar 12	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2021.....	45
Gambar 13	Kebijakan Merdeka Belajar .....	11

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah Personalia Struktural Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	23
Tabel 2	Jumlah Personalia Struktural Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	24
Tabel 3	Jumlah Personalia Struktural Unit Pelayanan Teknis (UPT) .....	24
Tabel 4	Rekapitulasi Kualifikasi ASN Berdasarkan golongan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	24
Tabel 5	Rekapitulasi Kualifikasi ASN Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	25
Tabel 6	Jumlah Sekolah di Provinsi DKI Jakarta .....	25
Tabel 7	Jumlah Peserta Didik Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ...	26
Tabel 8	Rekapitulasi Sertifikasi Guru Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	26
Tabel 9	Rekapitulasi Status Guru Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	27
Tabel 10	Rincian Aset Tanah .....	27
Tabel 11	Rincian Aset Peralatan dan Mesin .....	28
Tabel 12	Rincian Aset Gedung dan Bangunan .....	30
Tabel 13	Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	31
Tabel 14	Rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	32
Tabel 15	Jumlah Penerima KJP Tahap 2 DKI Jakarta .....	39
Tabel 16	Jumlah Penerima KJMU .....	40
Tabel 17	Jumlah Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Pembangunan Unit Sekolah Baru .....	41
Tabel 18	Presentase Guru Kompeten yang Memenuhi Nilai Standar UKG.....	43
Tabel 19	Angka Kelulusan Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta ....	43
Tabel 20	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Provinsi DKI Jakarta .....	44
Tabel 21	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta 2017-2021	46
Tabel 22	Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan 2017-2021.....	47
Tabel 23	Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan .....	9
Tabel 24	Analisis Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek.....	24
Tabel 25	Jumlah Satuan Pendidikan Per Kelurahan .....	29

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu dari empat tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang didalamnya menjelaskan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada UU tersebut dijelaskan pula bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat menjadi komponen penyelenggara pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas UU Sisdiknas yang bertujuan untuk pembangunan pendidikan diperlukan instrumen untuk memenuhi tujuan tersebut melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah di atur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada level provinsi dan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada level unsur pelaksana, dan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada level provinsi dan dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) pada level unsur pelaksana. Dokumen-dokumen tersebut dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPD 2023-2026

RPJPD dan RPD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah terutama terkait standar pelayanan. Selanjutnya, RPD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 4 (empat) tahun. RPD dan RKPD diterjemahkan dan dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD serta UKPD dalam menyusun Renja UKPD. Renstra SKPD dan Renja SKPD/UKPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Rumusan strategi tersebut harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah dan menjadi jembatan untuk dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasar warganya dalam kerangka pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan beberapa parameter sebagai indikasi bagaimana strategi-strategi tersebut dapat menciptakan sebuah nilai (*strategic objective*). Selanjutnya, parameter-parameter tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 disusun sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam pembangunan pendidikan serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPD. Renstra tersebut disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dalam dokumen Renstra 2023-2026 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan / sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, tujuan, dan sasaran;
3. Sebagai acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kontribusi pencapaian kinerja Dinas secara keseluruhan;
4. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk tersedianya pedoman arah pembangunan pendidikan bagi semua tingkatan pengelolaan pendidikan di DKI Jakarta dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, dan juga sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja SKPD, kontrak kinerja kepala SKPD dengan Gubernur, serta monitoring dan evaluasi hasil kinerja SKPD.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Amanat UUD Tahun 1945, amandemen ke-4 pada pasal 31 tentang Pendidikan
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
- 9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
- 10) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- 11) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- 12) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 14) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 15) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16) PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 17) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 18) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 19) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 20) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 21) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
- 22) Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
- 23) Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 24) Permen PPN / Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019
- 25) Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
  - a. Pasal 4 ayat (4) : Unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian
  - b. Pasal 4 ayat (5) : Unit kerja eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon I.
- 26) Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA)
- 27) Permendiknas No 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
- 28) Permendiknas No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 29) Permendikbud No 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 34) Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 35) Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 36) Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
- 37) Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026
- 38) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 tahun 2016 tentang Organisasi Tata

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Kerja Dinas Pendidikan

- 39) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPD, Renstra SKPD, RKPD Dan Renja SKPD/UKPD.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan 2023-2026 terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik awal perencanaan yang akan dibuat untuk 4 tahun yang akan datang.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Fokus bab ini adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah yang ditinjau dari kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemampuan perangkat daerah dalam mendukung visi, misi dan program kepala daerah, program dan target pemerintah pusat, dan RTRW yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis perangkat daerah.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Isu-isu strategis yang telah dirumuskan menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah dan menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada lima tahun yang akan datang.

### **BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang digunakan dalam dokumen Renstra telah tercantum dalam RPD.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Bagian ini mengemukakan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang

## BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah disusun.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Pendidikan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### 2.1.1 Tugas

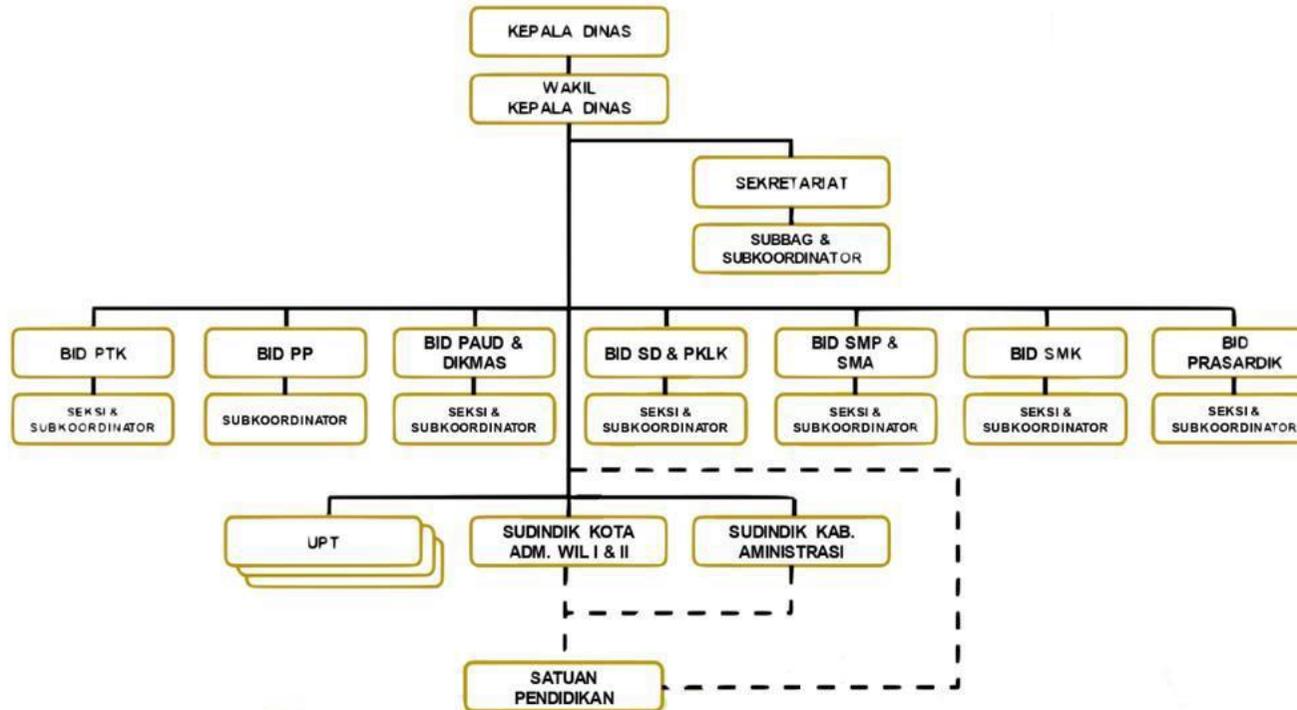
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

#### 2.1.2 Fungsi

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan pendidikan;
- 4) Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, luar biasa, pendidikan non formal dan informal;
- 5) Pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 6) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan;
- 7) Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga dan/atau satuan pendidikan;
- 8) Penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan pendidikan;
- 10) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- 11) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan;
- 12) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pendidikan;
- 13) Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan;
- 14) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Pendidikan;
- 15) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;
- 16) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pendidikan; dan
- 17) Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

2.1.3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga
- 4) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. Seksi Pendidik;
  - b. Seksi Tenaga Kependidikan;
  - c. Seksi Pengembangan Karir.
- 5) Bidang Perencanaan dan Penganggaran, terdiri atas :
  - a. Subkoordinator Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b. Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Pendidikan;
  - c. Subkoordinator Standardisasi dan Pengembangan.
- 6) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas :
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
  - c. Seksi Kursus dan Pendidikan Masyarakat.
- 7) Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdiri atas :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.
- 8) Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.
- 9) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.
- 10) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan terdiri atas :
  - a. Seksi Gedung;
  - b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
  - c. Seksi Manajemen Aset.
- 11) Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- 12) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- 13) Unit Pelaksana Teknis;
- 14) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsinya masing-masing adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas:
  - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.
2. Wakil Kepala Dinas memiliki tugas:
- a. Membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan Koordinasi dengan instansi pemerintah;
  - c. Membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan;
  - d. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikanserta Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan pendidikan;
  - f. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal;
  - g. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
  - h. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
3. Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
  - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
  - c. Pengelolaan surat menyurat Dinas Pendidikan;
  - d. Pengelolaan kearsipan Dinas Pendidikan;
  - e. Pengelolaan perpustakaan Dinas Pendidikan;
  - f. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;
  - g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan lainnya;
  - h. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi internal Dinas Pendidikan;
  - j. Pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan;
  - k. Penyusunan laporan keuangan dan aset Dinas Pendidikan;
  - l. Pengembangan kerjasama Dinas Pendidikan dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
  - m. Pelaksanaan tugas kehumasan Dinas Pendidikan;
  - n. Pelaksanaan pengaturan acara Dinas Pendidikan;
  - o. Penyediaan informasi publik Dinas Pendidikan; dan

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- p. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajemen pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tenaga Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. Pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. Penyusunan dan pengajuan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - d. Penyusunan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - e. Pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - f. Penatausahaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - g. Pelaksanaan proses administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - h. Pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - i. Pengendalian disiplin pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - j. Pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik dan kode perilaku pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - l. Pelaksanaan proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - m. Pengelolaan statistik dan database pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - n. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan;
  - o. Pengurusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan;
  - p. Pengurusan purnabakti pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan; dan
  - q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Bidang Perencanaan dan Penganggaran  
Bidang Perencanaan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penganggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penganggaran mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- c. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
  - d. Pembinaan perencanaan dan penganggaran terhadap unit kerja Dinas Pendidikan;
  - e. Pengkajian dan pengajuan program prioritas Dinas Pendidikan;
  - f. Pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi Dinas Pendidikan;
  - g. Penghimpunan pengkajian dan penyajian penganggaran dari unit kerja Dinas Pendidikan;
  - h. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan, rapat koordinasi Bidang, rapat kerja dengan legislatif, rapat monitoring, dan evaluasi Sekretariat Daerah;
  - i. Pengoordinasian, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
  - j. Pelaksanaan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan program prioritas Dinas Pendidikan;
  - k. Penyusunan laporan prestasi/kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan;
  - l. Penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja, laporan kegiatan, dan akuntabilitas Dinas Pendidikan;
  - m. Pengoordinasian pembinaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
  - n. Pengorganisasian penyusunan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur Dinas Pendidikan;
  - o. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dan/atau pengawasan oleh auditor negara, aparat pengawasan internal pemerintahan dan/atau lembaga pengawasan publik;
  - p. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan oleh auditor negara, aparat pengawasan internal pemerintahan dan/atau lembaga pengawasan publik;
  - q. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Dinas Pendidikan;
  - r. Penyusunan bahan paparan, sambutan, kertas kerja dan makalah pimpinan yang tidak meliputi subtansi bidang lain, suku dinas dan unit pelaksana teknis;
  - s. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dana dekonsentrasi, bantuan dan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
  - t. Pelaksanaan kajian dan pengembangan bidang pendidikan;
  - u. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan kelembagaan; dan
  - v. Pelaporan dan pertanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Penganggaran.
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- c. Penyusunan bahan kebijakan/regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kurikulum serta penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi peserta didik dan sumber belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - g. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - h. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - i. Pemberian rekomendasi sumber belajar dan alat pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - j. Pembinaan lembaga penyelenggara peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus;
  - k. Pemberian rekomendasi muatan lokal berdasarkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - l. Penyusunan statistik daya tampung peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - m. Pendampingan pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik baru pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - n. Penetapan kebutuhan perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - o. Pemetaan kebutuhan guru, instruktur, tutor dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - p. Pemberian penghargaan dan apresiasi terhadap lembaga, peserta didik, guru, tutor, instruktur, penilik, pamong belajar, dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - q. Pembinaan terhadap Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Daerah;
  - r. Penyusunan petunjuk penilaian hasil pembelajaran dan ujian akhir satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian hasil pembelajaran dan ujian akhir Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - t. Pembinaan dan pendayagunaan alat pembelajaran dan sumber belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - u. Penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - v. Penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  - w. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
7. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Pembinaan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- b. Penyusunan bahan kebijakan/regulasi teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- c. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- d. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- e. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SKYBS) Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah;
- f. Penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar mengajar dan ujian akhir sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. Penyusunan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. Pembinaan, penilaian serta pemberian apresiasi kepada satuan pendidikan dan peserta didik berprestasi;
- j. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan sumber belajar SD dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- k. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- l. Pemberian rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- m. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- n. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- o. Penyusunan bahan standarisasi perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- p. Penyusunan analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan;
- q. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- r. Penyusunan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- s. Pemfasilitasian penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan SD dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

8. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
- Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan/regulasi teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
  - c. Pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
  - d. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kurikulum dan penilaian SMP dan SMA;
  - e. Pengesahan fotokopi SKYBS Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah;
  - f. Penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar mengajar dan ujian akhir SMP dan SMA;
  - g. Penyusunan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu SMP dan SMA;
  - h. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter SMP dan SMA;
  - i. Pembinaan, penilaian serta pemberian apresiasi kepada satuan pendidikan dan peserta didik berprestasi;
  - j. Pembinaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penerimaan peserta didik baru SMP dan SMA;
  - k. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan sumber belajar SMP dan SMA;
  - l. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan SMP dan SMA;
  - m. Pemberian rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMP dan SMA;
  - n. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SMP dan SMA;
  - o. Penyusunan bahan standardisasi perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran SMP dan SMA;
  - p. Penyusunan analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan;
  - q. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan SMP dan SMA;
  - r. Penyusunan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dan SMA;
  - s. Pemfasilitasian penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan SMP dan SMA; dan
  - t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

### 9. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi SMK. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan/regulasi teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kurikulum dan penilaian SMK;
- e. Pengesahan fotokopi SKYBS Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah;
- f. Penyusunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar mengajar dan ujian akhir SMK;
- g. Penyusunan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan mutu SMK;
- h. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dan sumber belajar SMK;
- i. Pembinaan, penilaian serta pemberian apresiasi kepada satuan pendidikan dan peserta didik berprestasi;
- j. Pengkoordinasian kegiatan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik;
- k. Pembinaan, sosialisasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penerimaan peserta didik baru SMK;
- l. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter SMK;
- m. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMK;
- n. Pemberian rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan SMK;
- o. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SMK;
- p. Penyusunan bahan standarisasi perlengkapan dan peralatan sarana penunjang pembelajaran SMK;
- q. Penyusunan analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan;
- r. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kelembagaan SMK;
- s. Penyusunan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK;
- t. Pemfasilitasian penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan SMK;
- u. Pengkoordinasian penyusunan standar dan kebutuhan peralatan praktik Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;
- v. Pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit produksi/*teaching factory*;
- w. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang keahlian, dan program keahlian;

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- x. Pelaksanaan penelitian standar kebutuhan bidang keahlian; dan
  - y. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan
- Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana satuan pendidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan;
  - b. Pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan;
  - c. Penyusunan rencana induk kebutuhan dan standar bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
  - d. Pemetaan ketersediaan dan kelaikan bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
  - e. Penyusunan rencana kebutuhan pembangunan bangunan gedung satuan pendidikan baru, peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
  - f. Penyusunan rencana kebutuhan rehab total bangunan gedung satuan pendidikan secara periodik;
  - g. Penyiapan bahan usulan kebutuhan pembangunan baru dan rehab total bangunan gedung satuan pendidikan;
  - h. Penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan rehab total dan relokasi bangunan gedung satuan pendidikan;
  - i. Penyusunan kebutuhan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung baru/relokasi/rehab total bangunan gedung satuan pendidikan;
  - j. Penyusunan kebutuhan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;
  - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan, dan penggunaan prasarana dan sarana satuan pendidikan;
  - l. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan, dan penggunaan prasarana dan sarana satuan pendidikan;
  - m. Pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi prasarana dan sarana pendidikan dengan instansi terkait;
  - n. Penyiapan bahan usul penghapusan prasarana dan sarana satuan pendidikan;
  - o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penatausahaan aset prasarana dan sarana pendidikan; dan
  - p. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.
11. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Setiap Kota Administrasi dibentuk 2 (dua) Suku Dinas Pendidikan, yang terdiri atas :
- a. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- i. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- j. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan di wilayah Kota Administrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan;
- d. Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas/Penilik, dan Kepala Sekolah;
- f. Pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan;
- g. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan;
- h. Penyampaian rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan kepada Kepala Dinas;
- i. Pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan;
- j. Penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan rehab sedang bangunan gedung satuan pendidikan;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- m. Pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan SMK;
- n. Pengendalian pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler);
- o. Penyusunan usulan kebutuhan pembangunan, rehab total, dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
- p. Penyampaian usulan penghapusan aset prasarana dan sarana;
- q. Penyampaian usulan kebutuhan penggantian meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, dan lemari kerja;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- r. Penyampaian rekomendasi atas pengadaan lahan/aset lainnya untuk kepentingan pendidikan;
- s. Pemantauan dan dukungan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- t. Penerbitan surat keterangan pengganti dan legalisasi ijazah;
- u. Pelaksanaan lomba/ festival/ pertandingan/ olimpiade peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan pada tingkat Kota Administrasi;
- v. Penyediaan anggaran sewa bangunan gedung/gudang untuk pengganti sementara bangunan gedung satuan pendidikan yang dalam proses/kegiatan rehab sedang/rehab berat/rehab total;
- w. Fasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C;
- x. Pelaksanaan pengesahan mutasi peserta didik dalam 1 (satu) wilayah kerja suku dinas pendidikan;
- y. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- z. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- aa. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan
- bb. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

Suku Dinas Pendidikan terdiri dari :

### 1) Kepala Suku Dinas

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dan Subkelompok Jabatan Fungsional Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

### 2) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan E-RKAS BOS dan BOP;
- g. Melaksanakan pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan;

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- h. Melaksanakan pengelolaan barang;
  - i. Melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
  - j. Memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
  - k. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - l. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
  - m. Melaksanakan pengaturan acara Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
  - n. Menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/ peralatan kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
  - o. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/ peralatan/ inventaris kantor Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
  - p. Melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
  - q. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan
  - r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan untuk wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
  - d. Mengendalikan, memonitor dan melaporkan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
  - e. Mengendalikan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - f. Melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - g. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - i. Melaksanakan kegiatan pengurusan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - j. Menyusun peta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - k. Melaksanakan kegiatan pengurusan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan kegiatan pengurusan purnabakti pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya; dan
  - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, pelaporan kegiatan satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - d. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Penilik dan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - g. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - h. Menyusun rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas;
  - i. Menyusun kebutuhan sumber belajar dan sarana penunjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - j. Melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - k. Melaksanakan penilaian teknis lapangan atas permintaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - l. Melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
  - m. Melaksanakan pendampingan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus;
  - n. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - o. Melaksanakan lomba/ festival/ pertandingan warga belajar/ pendidik/ tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di wilayah kerjanya;
  - p. Memberikan bimbingan teknis kepada lembaga non formal dan informal;
  - q. Melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - r. Menilai dan memberikan apresiasi kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik, guru, tutor, instruktur, penilik, pamong belajar dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;
  - s. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi untuk diajukan ke Tingkat Provinsi;
  - t. Menyiapkan alat kelengkapan ujian sekolah berstandar daerah;
  - u. Melaksanakan proses penilaian, analisa dan pelaporan hasil Ujian Sekolah berstandar daerah;
  - v. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  - w. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- 5) Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- g. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- h. Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dari Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas;
- i. Melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- j. Melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan muatan lokal SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- k. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- l. Melaksanakan lomba/ festival/ pertandingan peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di wilayah kerjanya;
- m. Penilaian dan pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi di wilayah kerjanya;
- n. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi untuk diajukan ke Tingkat Provinsi;
- o. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SD, SMP dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
- p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

## 6) Seksi Pendidikan Menengah

Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, pelaporan kegiatan satuan pendidikan SMA dan SMK;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA dan SMK;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan data dan informasi setiap satuan pendidikan SMA dan SMK;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SMA dan SMK;
  - g. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SMA dan SMK;
  - h. Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SMA dan SMK kepada Kepala Suku Dinas;
  - i. Melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan SMA dan SMK;
  - j. Melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan muatan lokal SMA dan SMK;
  - k. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SMA dan SMK;
  - l. Melaksanakan lomba/ festival/ pertandingan peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan SMA dan SMK di wilayah kerjanya;
  - m. Penilaian dan pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi di wilayah kerjanya;
  - n. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap satuan pendidikan dan/atau peserta didik berprestasi untuk diajukan ke Tingkat Provinsi;
  - o. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SMA dan SMK; dan
  - p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Menengah.
- 7) Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan
- Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebutuhan rehab sedang dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
  - d. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dan penggantian sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
  - f. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan kebutuhan pembangunan, rehab total, dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
  - g. Melaksanakan proses perizinan yang dibutuhkan dan melaksanakan kegiatan rehab sedang dan rehab berat untuk rumah dinas, baik rumah dinas penjaga sekolah, guru atau kepala sekolah;
  - h. Melaksanakan penghapusan aset prasarana dan sarana;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- i. Melaksanakan kegiatan penyampaian usulan kebutuhan penggantian meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, dan lemari kerja;
  - j. Melaksanakan kegiatan penyampaian rekomendasi atas pengadaan lahan/aset lainnya untuk kepentingan pendidikan;
  - k. Melaksanakan kegiatan penyediaan anggaran sewa bangunan gedung/gudang untuk pengganti sementara bangunan gedung satuan pendidikan yang dalam proses/kegiatan rehab sedang/ rehab berat/rehab total; dan
  - l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasana dan Sarana Pendidikan dan Aset.
- 8) Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
- Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan mengajukan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pendidikan pada wilayah kecamatan;
  - d. Melaksanakan pelayanan konsultasi teknis administrasi pendidikan pada wilayah kecamatan;
  - e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan nonperizinan pada wilayah kecamatan;
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana satuan pendidikan pada wilayah kecamatan;
  - g. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kawasan dan lingkungan satuan pendidikan;
  - h. Melaksanakan pembinaan perwujudan satuan pendidikan dan peserta didik bebas tindak kekerasan di dalam dan di luar satuan pendidikan;
  - i. Mengembangkan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan tokoh masyarakat, pengurus wilayah, aparat keamanan, dan aparat hukum setempat;
  - j. Melaksanakan pemantauan peserta didik yang berada di luar sekolah pada jam belajar;
  - k. Melaksanakan pemantauan lingkungan kegiatan peserta didik setelah jam pulang sekolah;
  - l. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan jam belajar malam;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Suku Dinas; dan
  - n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan pada Kecamatan.

### 9) Subkelompok Jabatan Fungsional

#### 12. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan Luar Biasa, pendidikan sekolah menengah

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

pertama, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan sekolah menengah kejuruan serta pendidikan nonformal dan informal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan;
- d. Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Pengawas/ Penilik, dan Kepala Sekolah;
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan;
- g. Penyampaian rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan kebutuhan rehab sedang bangunan gedung satuan pendidikan;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan sarana satuan pendidikan di luar sarana untuk gedung baru/rehab total/relokasi bangunan gedung, meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, lemari kerja, mesin praktik utama pada SMK, buku pegangan peserta didik, buku pegangan pendidik, dan buku koleksi perpustakaan satuan pendidikan;
- l. Pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMA, dan SMK;
- m. Pengendalian pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler);
- n. Penyusunan usulan kebutuhan pembangunan, rehab total, dan rehab berat bangunan gedung satuan pendidikan;
- o. Penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan rehab sedang bangunan gedung satuan pendidikan;
- p. Penyampaian usulan penghapusan aset prasarana dan sarana;
- q. Penyampaian usulan kebutuhan penggantian meja dan kursi belajar, meja dan kursi kerja, lemari ruang kelas, dan lemari kerja;
- r. Penyampaian rekomendasi atas pengadaan lahan/aset lainnya untuk kepentingan pendidikan;
- s. Pemantauan dan dukungan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- t. Penerbitan surat keterangan pengganti dan legalisasi ijazah;
- u. Pelaksanaan lomba/ festival/ pertandingan/ olimpiade peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan pada tingkat Kabupaten Administrasi;
- v. Penyediaan anggaran sewa bangunan gedung/gudang untuk pengganti sementara bangunan gedung satuan pendidikan yang dalam proses/kegiatan rehab sedang/rehab berat/rehab total;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- w. Pemfasilitasian pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C;
- x. Pelaksanaan pengesahan mutasi peserta didik dalam 1 (satu) wilayah;
- y. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- z. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- aa. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan
- bb. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi terdiri dari :

### 1) Kepala Suku Dinas

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dan Subkelompok Jabatan Fungsional Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.

### 2) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang;
- g. Melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- h. Memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
- i. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- k. Melaksanakan upacara dan pengaturan upacara Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- l. Menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
- m. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- n. Melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
  - o. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
  - p. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengajuan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - q. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan dalam satu wilayah Kabupaten Administrasi;
  - r. Mengendalikan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - s. Melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - t. Melaksanakan proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - u. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - v. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - w. Melaksanakan kegiatan pengurusan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - x. Menyusun peta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - y. Melaksanakan kegiatan pengurusan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan;
  - z. Melaksanakan kegiatan pengurusan purnabakti pendidik dan tenaga kependidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dan satuan pendidikan; dan
  - aa. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- 3) Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus  
Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - d. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - g. Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus kepada Kepala Suku Dinas;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izinsatuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - i. Melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - j. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - k. Melaksanakan lomba/ festival/ pertandingan peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tingkat Kabupaten Administrasi;
  - l. Melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - m. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; dan
  - n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pendidikan SD, SMP, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- 4) Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - d. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Pengawas dan Kepala SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan non izin satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - g. Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran izin dan non izin satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat kepada Kepala Suku Dinas;
  - h. Melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi teknis pemberian izin dan non izin satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - i. Melaksanakan kegiatan pengajuan usulan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - j. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - k. Melaksanakan lomba/ festival/ pertandingan peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan SMA, SMK, dan PAUD dan Dikmas pada tingkat Kabupaten Administrasi;

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- l. Melaksanakan penilaian kinerja satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. Melakukan Pengawasan dan Monitoring pendataan BOP, KJP;
- n. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

## 5) Subkelompok Jabatan Fungsional

### 13. Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pendidikan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur.

### 14. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, Dinas Pendidikan dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## 2.2 Sumber Daya SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sejak diberlakukannya UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Bentuk Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, pembinaan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki sumber daya sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Personalia Struktural Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	JUMLAH
DINAS PENDIDIKAN	
Kepala Dinas	1
Wakil Kepala Dinas	1
Sekretariat	42
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	13
Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	19
Bidang SMK	19
Bidang SMP dan SMA	22
Bidang Perencanaan dan Penganggaran	16
Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	27
Bidang PTK	36
Total	196

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 2 Jumlah Personalia Struktural Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD	JUMLAH
<b>SUKU DINAS PENDIDIKAN</b>	
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	31
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat	137
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	137
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat	103
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat	96
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara	85
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara	115
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan	237
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan	238
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur	322
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur	304
<b>TOTAL</b>	<b>1.805</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 3 Jumlah Personalia Struktural Unit Pelayanan Teknis (UPT)

SKPD/UKPD	JUMLAH
<b>UNIT PELAYANAN TEKNIS</b>	
Pusat Data Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	15
Pusat Pelatihan Dan Pengembangan PAUD Dan Dikmas	10
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan	15
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Pusat	10
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Selatan	15
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Barat	11
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Timur	14
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan Jakarta Utara	8
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 4 Rekapitulasi Kualifikasi ASN Berdasarkan golongan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

GOLONGAN	UNIT KERJA				TOTAL
	DINAS	SUKU DINAS	UPT	SEKOLAH	
I	0	0	0	0	0
II	2	0	0	0	2
III	6	8	8	0	22
IV	10	49	7	164	230

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 5 Rekapitulasi Kualifikasi ASN Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

PENDIDIKAN	UNIT KERJA				TOTAL
	DINAS	SUKU DINAS	UPT	SEKOLAH	
SD/MI	0	2	0	109	111
SMP/Mts	0	6	0	193	199
SMA/MA/SMK	62	146	29	634	871
Diploma	15	33	7	37	92
S1	110	213	50	367	740
S2	9	35	12	29	85
S3	0	0	0	1	1
Total	196	435	98	1.370	2.099

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 6 Jumlah Sekolah di Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupate	TK/KB/TPA/SPS			SD			SMP			SMA			SMK			SLB			Total		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
		1	Kota Jakarta Timur	1304	39	1265	67	400	207	264	95	169	123	40	83	195	21	174	25	1	24	2518
2	Kota Jakarta Barat	790	22	768	563	320	243	283	50	233	119	17	102	119	1	108	21	3	18	1895	423	1472
3	Kota Jakarta Selatan	906	32	874	461	279	182	224	66	158	106	29	77	127	18	109	28	5	23	1852	429	1423
4	Kota Jakarta Utara	623	25	598	335	136	199	193	39	157	90	17	73	76	8	68	9	3	6	1326	228	1098
5	Kota Jakarta Pusat	447	28	419	259	158	101	112	36	76	56	13	43	58	14	44	6	1	5	938	250	688
6	Kab. Kepulauan	27	19	8	14	14	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	50	42	8
Tota			4097	165	3932	2293	1307	932	1083	293	790	495	117	378	576	73	503	89	13	76	8579	1968

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 7 Jumlah Peserta Didik Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Kota/Kabupaten	TK/KB/TPA/SPS			SD			SMP			SMA			SMK			SLB			Total		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kota Jakarta Timur	31346	1074	30272	238738	184520	54218	106711	77099	29612	57383	32422	24961	60742	15933	44809	1481	267	1214	496401	311315	185086
2	Kota Jakarta Barat	23603	583	23020	175579	119948	55631	76260	38185	38075	33077	13162	19915	44847	8018	36829	1291	535	756	354657	180431	174226
3	Kota Jakarta Selatan	20937	1029	19908	157624	116311	41313	76118	50341	25777	43457	23324	20133	44271	13549	30722	1953	931	1022	344360	205485	138875
4	Kota Jakarta Utara	16556	940	15616	125732	74391	51341	57107	30203	26904	26090	12675	13415	27719	7884	19835	837	653	184	254041	126746	127295
5	Kota Jakarta Pusat	8965	818	8147	77277	57552	19725	40956	24578	16378	19747	9211	10536	24167	11436	12731	474	205	269	171586	103800	67786
6	Kab. Kepulauan Seribu	1142	933	209	2533	2533	0	1126	1126	0	577	577	0	515	515	0	0	0	0	5893	5684	209
Total			102549	5377	97172	777483	555255	222228	358278	221532	136746	180331	91371	88960	202162	57335	144926	6036	2591	3445	1626938	933461

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 8 Rekapitulasi Sertifikasi Guru Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

NO	STATUS	TK			SLB			SD			SMP			SMA			SMK			TOTAL		
		JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S
1	SERTIFIKASI	2.234	126	2.108	584	251	333	15.311	11.443	3.868	9.024	6.420	2.604	5.545	3.519	2.026	4.488	1.952	2.536	37.186	23.711	13.475
2	BELUM SERTIFIKASI	10.676	321	10.355	720	337	383	21.812	11.091	10.721	9.127	3.125	6.002	5.512	1.449	4.063	6.743	1.128	5.615	54.590	17.451	37.139
TOTAL		12.910	447	12.463	1.304	588	716	37.123	22.534	14.589	18.151	9.545	8.606	11.057	4.968	6.089	11.231	3.080	8.151	91.776	41.162	50.614

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 9 Rekapitulasi Status Guru Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

STATUS	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
GURU PNS	121	11.542	6.551	3.368	1.643	148	23.373
GURU CPNS	18	1.324	578	411	89	62	2.482
GURU HONORER	4.223	12.359	4.469	3.020	3.930	350	28.351
TOTAL	4.362	25.225	11.598	6.799	5.662	560	54.206

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

## 2.2.2 Aset/Modal dan Pelayanan

Selain sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal). Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu :

- 1) KIB A : Tanah
- 2) KIB B : Peralatan dan mesin
- 3) KIB C : Gedung dan bangunan
- 4) KIB D : Jalan, irigasi dan jaringan
- 5) KIB E : Aset tetap lainnya
- 6) KIB F : Konstruksi dalam pengerjaan

Seluruh aset tersebut tersebar pada lokasi dinas, suku dinas pendidikan wilayah 1 dan 2, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan seluruh sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Rincian aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 10 Rincian Aset Tanah

JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	TOTAL LUAS TANAH/BANGUNAN
Tanah Lapangan Parkir Konblok	1	500 m <sup>2</sup>
Tanah Lapangan Basket	1	330 m <sup>2</sup>
Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	1	264 m <sup>2</sup>
Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan	6	16.470 m <sup>2</sup>
Tanah Kebun	1	742 m <sup>2</sup>
Tanah Kampung	23	89.795 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	2.769 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Tempat Ibadah	2	342 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Rumah Penjaga	2	129 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	6	28.856 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal	3	75.942 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.563	6.173.193,105 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	6	9.277 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Laboratorium	1	600 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31	80.726,5 m <sup>2</sup>
Tanah Bangunan Bangsal	1	1278 m <sup>2</sup>
Lain-lain	4	14.768 m <sup>2</sup>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 11 Rincian Aset Peralatan dan Mesin

JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)
AC Split	6.819
AC Unit	1.798
Alat Pemadam Kebakaran	1.222
Alat Pemadam/Portable	3037
Alat Pemanas Processing/ Water Heater	12
Alat Penghancur Kertas	1.169
Antena UHF Portable	45
Aquarium	50
Band Kas	169
Bangku Tunggu	10.395
Buffet Kaca	264
Camera Video	1.657
Cassette Recorder	154
Compresor Amplifier	3
Copy Board/Elektrik Whit Board	183
Digital Audio Tape Recorder	71
Equalizer	129
Facsimile	333
Filling Besi/Metal	2.853
Filling Kayu	213
Gambar Presiden/Wakil Presiden	234
Handy Cam	211
Handy Talky (Ht)	463
Kardek Besi/Metal	44
Kompor Gas	528
Kursi Biasa/Karyawan	15.569
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	724
Kursi Kayu/Rotan/Bambu	48.587
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11.769
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	12
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	187
Kursi Lipat	12.886
Kursi Rapat	15.682
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon	17
Kursi Tamu	3.062
Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon	1
Lain-Lain (Hand Metal Detactor)	22
LAIN-LAIN (Kursi Tunggu / Tamu)	3.062
LAIN-LAIN (Layar LCD/DII)	146
LAIN-LAIN (LCD/DII Alat Ktr)	2.936
Lain-Lain (Lemari Kayu/Pajangan)	18.434
Lain-Lain (Meja Counter/Receptionist)	149
Lain-Lain (Meja Tennis)	213
Lain-Lain (Podium Rapat)	261
Lap Top	12.889
Layar	750
Layar Film	334

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)
Lemari Besi/Metal	10.974
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon Iii	31
Lemari Es	644
Lemari Kaca	6.870
Lemari Kayu	18.434
Lemari Pakaian	229
Lemari Penyimpan	5.990
Loudspeaker	6.842
Loudspeker	2.433
Meja Besi/Metal	4.383
Meja Kerja	9.649
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11.211
Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	63
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	352
Meja Komputer	7.598
Meja Makan	128
Meja Panjang	4.207
Meja Podium	379
Meja Rapat	2.900
Meja Rapat Pejabat Eselon Ii	18
Meja Resepsion	219
Meja Tambahan	808
Meja Tamu Biasa	373
Meja Telpon	14
Meja Tik	296
Meja Tulis	21.028
Mesin Absen (Time Recorder)	463
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	63
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	50
Mesin Listrik Standar	18
Mesin Pel	22
Mesin Penghitung Uang	72
Mesin Perekam Stencil Folio	30
Mesin Potong Rumput	248
Microphone	3.734
Microphone Floor Stand	569
Microphone Table Stand	315
Microphone/Wireless Mic	1.567
Mixer	193
Monitor	10.038
Note Book	4.070
Overhead Projektor	1.476
P.C. Unit (Personal Computer)	18.569
Papan Pengumuman	6.563

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)
Papan Tulis	6.732
Pesawat Telephone	667
Peti Uang	45
Piano	254
Pick Up	10
Pompa Airasil	202
Portable Generating Set	44
Powder Mixer	2
Power Amplifier	110
Power Supply Microphone	26
Printer	11.862
Professional Soun System	3
Proyektor +Attachment	13.554
Rak Kayu	7.308
Rak Peralatan	399
Rak-Rak Penyimpan	3.333
Scanner	1.428
Server	1.803
Sound System	5.847
Station Wagon	7
Televisi	3.219
Tiang Bendera	800
Tongkat Kejut	42
Transportable Water Pomp	136
Tripod Camera	519
Tustel	207
Unit Power Supply	668
White Board	16.017
<b>TOTAL</b>	<b>419.125</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

*Tabel 12 Rincian Aset Gedung dan Bangunan*

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
Asrama Permanen	9
Bangunan Bengkel Permanen	15
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	18
Bangunan Gedung Instalasi Daruraat	2
Bangunan Gedung Instalasi Permanen	9
Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	1
Bangunan Gedung Kantor Permanen	262
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	4
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	59
Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	3

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
Bangunan Gedung Pendidikan Darurat	3
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2.984
Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	9
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	236
Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	6
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	41
Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	4
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22
Bangunan Gudang Terbuka Permanen	5
Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	4
Bangunan Gudang Tertutup Darurat	0
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	290
Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	16
Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	4
Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	1
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	280
Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1
Bangunan Olah Raga Tertut Permanen	4
Bangunan Rumah Sakit Umum	1
Bangunan Tempat Ibadah Darurat	1
Bangunan Tempat Ibadah Permanen	642
Bangunan Tempat Ibadah Semi Permanen	25
Gedung Garasi/Pool Permanen	1
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	153
Gedung Pos Jaga Darurat	1
Gedung Pos Jaga Permanen	434
Gedung Pos Jaga Semi Permanen	28
Hotel Permanen	1
Mesjid Bersejarah	1
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	40
Rumah Negara Golongan I	125
Rumah Negara Golongan li	117
Rumah Negara Golongan Iii	254
Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya	1
<b>Total</b>	<b>6.122</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

*Tabel 13 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan*

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
AIR SUMBER KAPASITAS SEDANG	2
INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	1

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

JENIS BARANG	JUMLAH (unit)
INSTALASI AIR TANAH DANGKAL KAPASITAS	1
INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	1
INSTALASI KOMUNIKASI ELEKTRONIK	1
INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	2
INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK LAIN-	23
JALAN KHUSUS	1
JALAN KHUSUS INSPEKSI	1
JALAN KHUSUS KOMPLEK	1
JALAN KHUSUS LAIN-LAIN	1
JARINGAN DISTRIBUSI LAIN-LAIN	1
JARINGAN PEMBAWA KAPASITAS SEDANG	1
JARINGAN TRANSMISI TEGANGAN DIATAS	1
SALURAN PENGUMPUL AIR KOTOR	1
SALURAN PENYIMPANAN AIR	2
<b>Grand Total</b>	<b>41</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

*Tabel 14 Rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan*

JENIS BARANG	JUMLAH (buah)
GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	55
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD (2017-2021)

#### 2.3.1 Capaian Indikator Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan yang berada di wilayah DKI Jakarta diatur oleh Dinas Pendidikan sebagai pemegang otoritas urusan pendidikan yang mengatur semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dinas Pendidikan harus memiliki indikator kerja untuk bisa menilai keberhasilan sebuah program yang dilaksanakan oleh UKPD dan satuan pendidikan.

Kondisi demografis penduduk DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat DKI Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2022 sebanyak 10.609.681 jiwa. Sedangkan data jumlah penduduk usia sekolah 3-18 tahun menurut Kemendikbudristek pada tahun 2021 mencapai 2.533.900 anak.

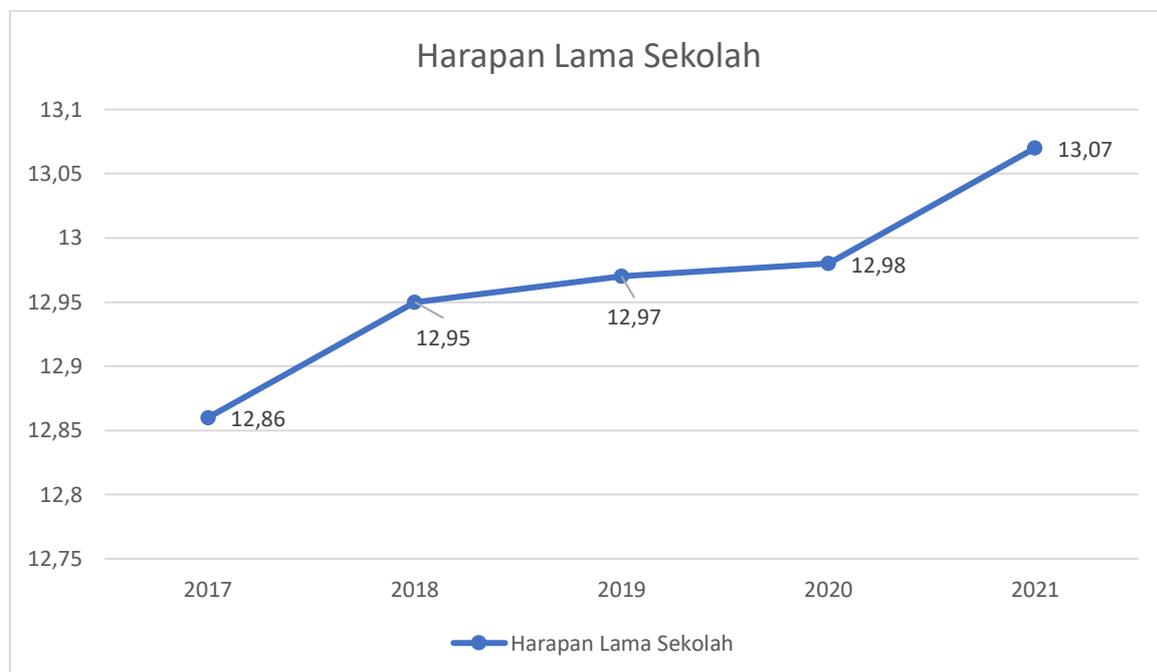
Jumlah peserta didik di DKI Jakarta berdasarkan Data Pokok Pendidikan dan EMIS di tahun 2021 mencapai 1.902.638. Dari data tersebut masih terdapat kurang lebih 600.000 anak yang tidak terdata atau belum mengakses pendidikan. Dibutuhkan integrasi data antara dukcapil dan dapodik serta emis untuk melihat ketepatan data, sehingga diperoleh data *by name by address* yang akurat untuk mampu memetakan dimana anak tersebut berada untuk mengklarifikasi apakah masih

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

bermukim di daerah tersebut atau sudah berpindah ke wilayah lain, serta dapat dilakukannya intervensi jika memang anak tersebut belum bersekolah. Untuk jumlah guru pada tahun 2021 menurut Dapodik dan EMIS mencapai 107.943 pendidik, yang terdiri dari 45.138 guru negeri dan 62.805 guru swasta. Hasil kajian Dinas Pendidikan masih terdapat kekurangan kebutuhan guru sebesar 18.856. Kajian ini memperhitungkan dengan kekurangan guru pada satuan pendidikan yang telah tersedia, jumlah guru yang akan pensiun pada 2023, dan penambahan unit sekolah baru, ruang kelas baru.

Dalam capaian indikator kinerja yang baik akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta. Salah satu dimensi dan indikator IPM adalah pendidikan, dimana bisa dilihat melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) usia 15 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut data angka Harapan Lama Sekolah penduduk DKI Jakarta dari tahun 2017-2021.

Gambar 2 Angka Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta



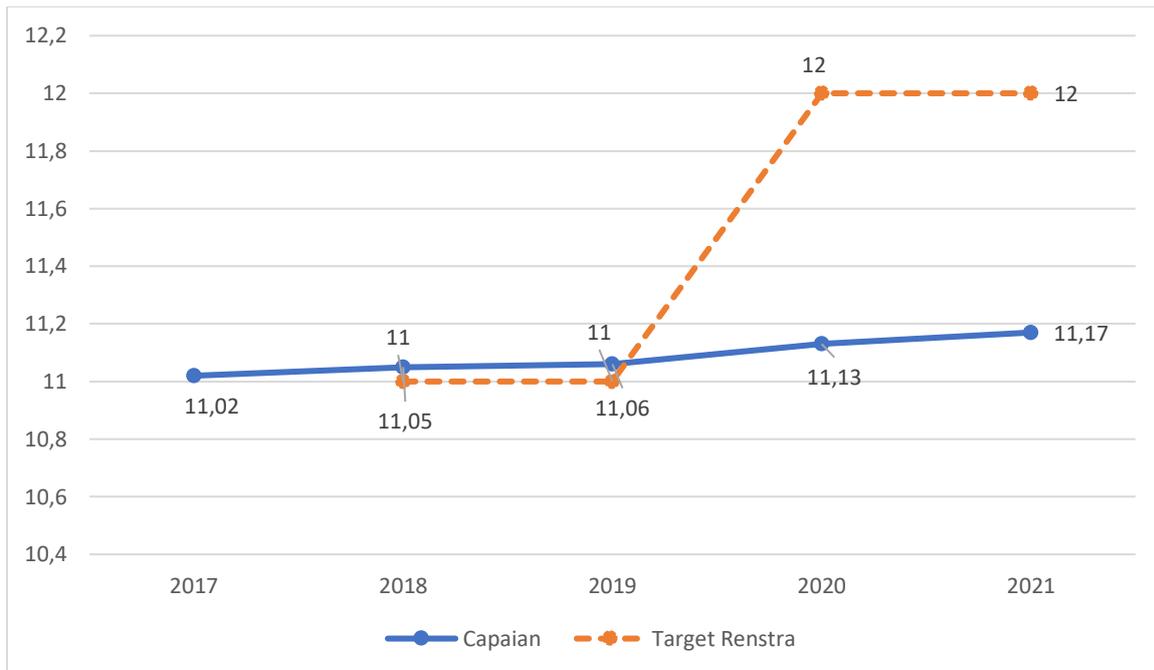
Sumber: Badan Pusat Statistik

Upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan partisipasi dan akses pendidikan menunjukkan capaian yang meningkat setiap tahun. Angka 13,07 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa anak-anak DKI Jakarta yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk menempuh pendidikan sampai Diploma 1. Kenaikan ini menunjukkan semakin terbukanya akses dan kesempatan belajar bagi warga Jakarta.

Selain Harapan Lama Sekolah, dimensi lainnya yang bisa dilihat adalah terjaminnya akses dan layanan serta perbaikan tata kelola pendidikan yang dapat dilihat melalui Rata-rata Lama Sekolah. Berikut data Rata-rata Lama Sekolah di DKI Jakarta.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Gambar 3 Angka Rata-rata Lama Sekolah



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kenaikan Rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta terjadi secara konsisten. Hal ini menunjukkan pendidikan yang ditempuh warga DKI Jakarta semakin panjang hingga kelas 11. Peningkatan tersebut juga menunjukkan jika penduduk miskin DKI Jakarta dapat mengakses pendidikan di setiap jenjang hingga jenjang menengah. Terbukanya akses dan kesempatan belajar yang ditunjukkan melalui HLS dan RLS dapat menjadi acuan bahwa rencana strategis Dinas Pendidikan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun memiliki dampak yang semakin membaik bagi pelayanan pendidikan.

Dalam periode Renstra 2017-2022 Dinas Pendidikan juga telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemerataan mutu pendidikan, dan meningkatkan relevansi pendidikan.

## A. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pada periode Renstra 2017-2022, Dinas Pendidikan meningkatkan upaya untuk dapat memberikan akses pendidikan bagi warga Jakarta. Wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan memiliki konsekuensi Pemerintah Provinsi wajib menyediakan pendidikan hingga jenjang menengah. Selain itu pada Dinas Pendidikan juga mendorong penyediaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam mengukur perluasan dan pemerataan akses pendidikan indikator yang digunakan: Persentase Angka Partisipasi Murni (APM); Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK); Persentase Angka Putus Sekolah; Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi; dan Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

APK digunakan untuk melihat proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai di DKI Jakarta. Kemudian Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi digunakan untuk melihat seberapa banyak satuan pendidikan baik negeri dan swasta yang dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Terakhir persentase sekolah yang sudah

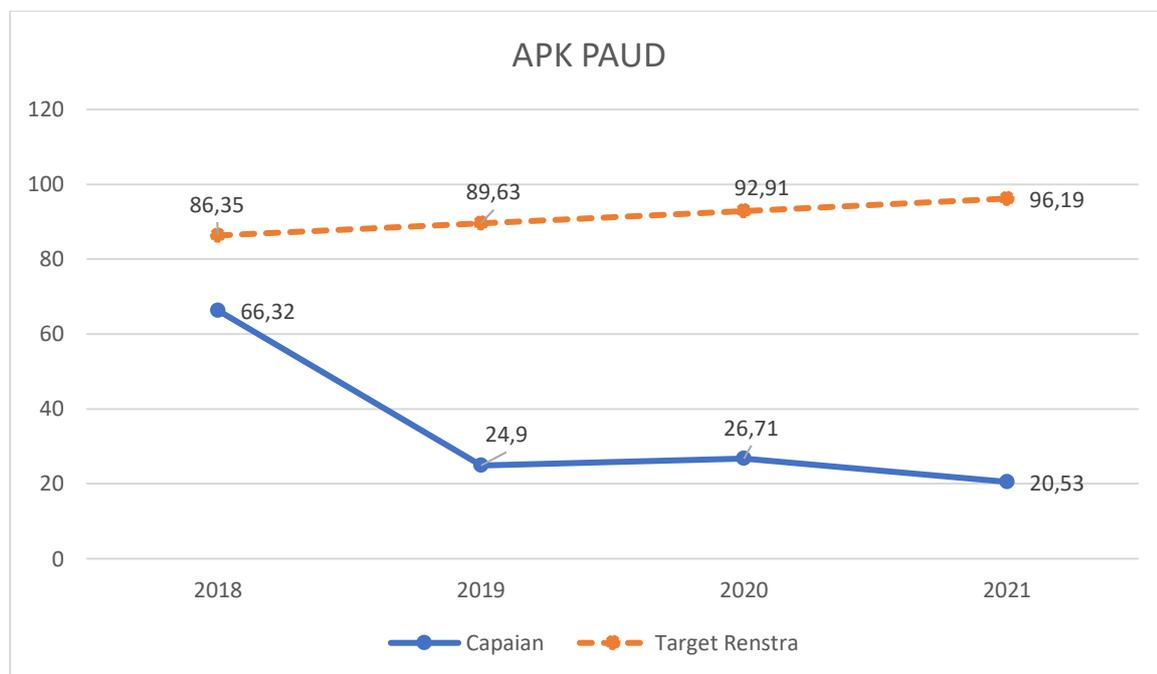
# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

menerima peserta didik berkebutuhan khusus berguna untuk mengukur seberapa banyak sekolah yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus .

## Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada jenjang PAUD, PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Kinerja Dinas Pendidikan dalam meningkatkan akses PAUD dapat dilihat melalui data Angka Partisipasi Kasar sebagai berikut:

Gambar 4 Angka Partisipasi Kasar PAUD di DKI Jakarta



Sumber: Kemendikbudristek

Pada data diatas menunjukkan penurunan signifikan APK PAUD yang terjadi di DKI Jakarta. Dari tahun 2018 sampai 2021. Di tahun 2018 APK mencapai 66,32 namun di tahun 2021 menurun sampai 20,53. Hal ini dikarenakan di tahun 2018 Kemendikbudristek dalam menentukan APK PAUD memakai metode sampling sehingga mendapatkan angka tersebut. Namun di tahun 2019 hingga 2021 penghitungan APK PAUD mengalami perubahan metode dengan menggunakan populasi sehingga mengalami penurunan. Selain itu perlu dilakukan penghitungan APK PAUD secara mandiri oleh Dinas Pendidikan dengan metode populasi yang lebih luas dan menyebar di setiap daerah DKI Jakarta, hal ini agar mendapatkan data pembandingan serta gambaran yang lebih komprehensif dan luas tentang capaian APK PAUD karena berdasarkan hasil FGD dengan berbagai stakeholder terdapat beberapa PAUD yang telah beroperasi namun belum memiliki ijin sehingga PAUD tersebut tidak terdata oleh pemerintah.

Rendahnya APK PAUD juga disebabkan masih rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta. Selain itu daya tampung PAUD di DKI Jakarta masih rendah meskipun tercatat di tahun 2022 jumlah PAUD di DKI Jakarta mencapai 5.072, diantaranya 165 merupakan Negeri, dan 4.907 swasta. Sedangkan jumlah peserta didik jenjang PAUD di tahun 2022 mencapai 132.930 (Data Dapodik dan Emis). hal ini berarti rata-rata 1 PAUD hanya bisa menampung 26 sampai 27 peserta didik. Rendahnya daya tampung ini

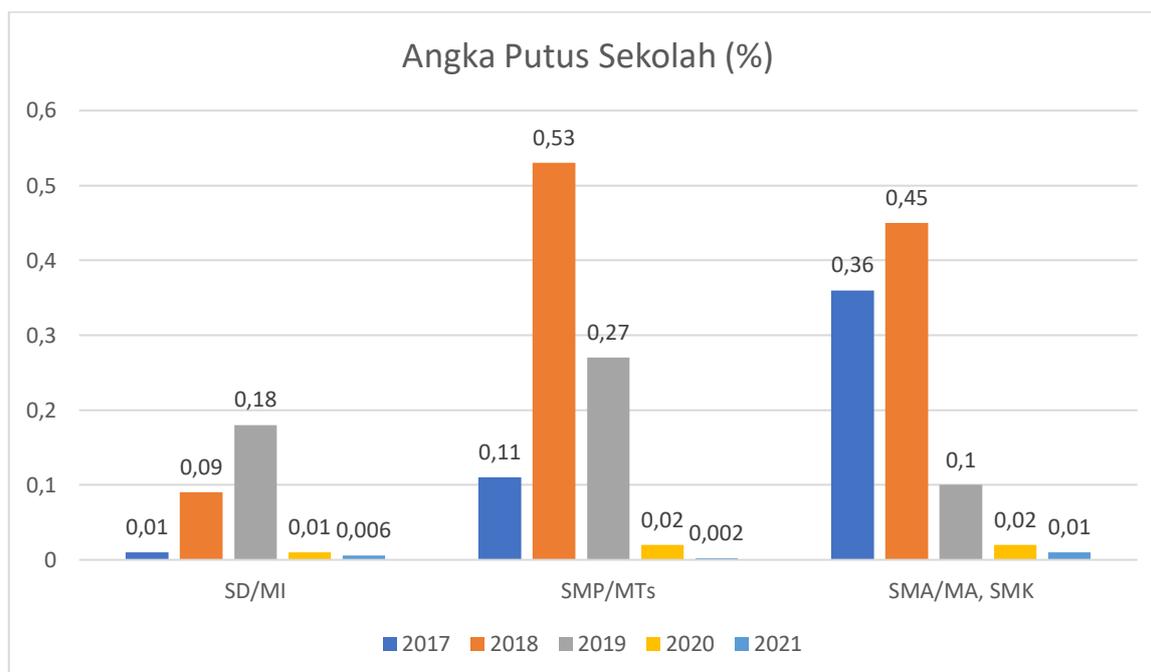
## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

diakibatkan karena masih kurangnya pendidik sehingga pemenuhan rombel pada PAUD tidak bisa terpenuhi secara maksimal, hal ini tercermin dari jumlah pendidik pada SPAUDN yaitu 457.

### *Pendidikan Dasar dan Menengah*

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12; 13-15; dan 16-18 tahun). Gambaran persentase Angka Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

*Gambar 5 Tren Angka Putus Sekolah DKI Jakarta*



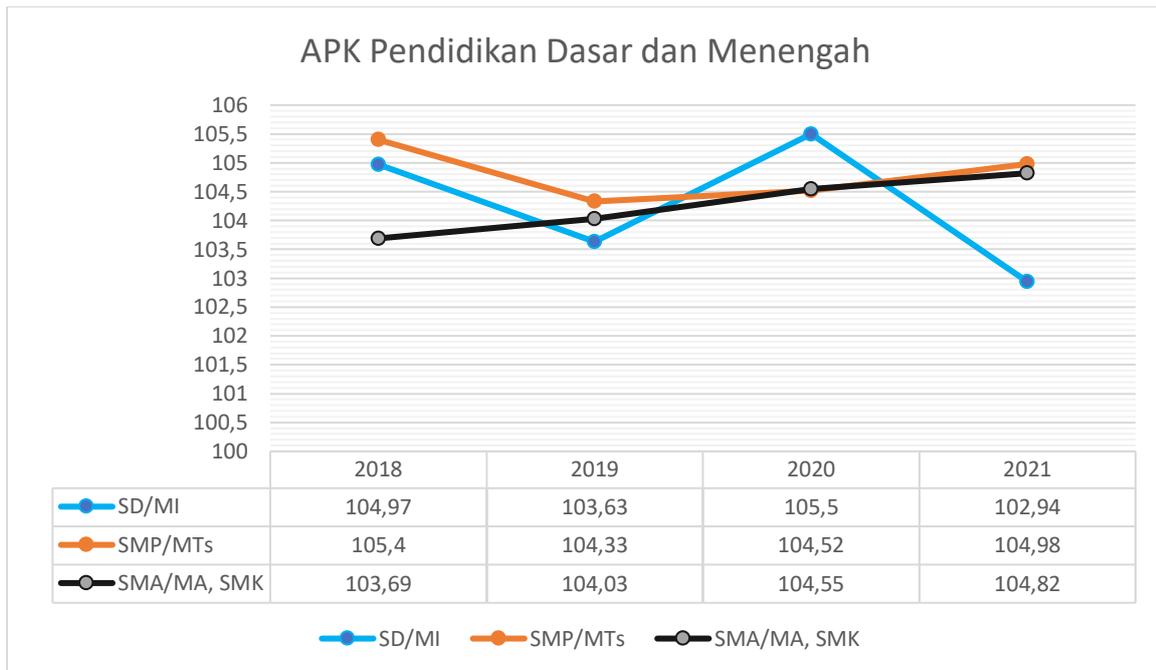
Sumber: Kemendikbudristek

Gambar 5 memperlihatkan terjadi kemajuan dalam penurunan APTS pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK. Penurunan signifikan ini merupakan hasil dari salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP merupakan salah satu kebijakan prioritas yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kartu Jakarta Pintar. KJP menysasar pada anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin untuk bisa mendapatkan akses dan mutu pendidikan yang baik pada jenjang kesetaraan, pendidikan dasar dan menengah. Hal ini agar mereka dapat mengakses pendidikan dan menamatkannya hingga jenjang menengah untuk mencapai wajib belajar 12 Tahun. Dampak dari menurunnya angka putus sekolah seharusnya dapat meningkatkan APK dan APM pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Secara umum Angka Partispasi Kasar di DKI Jakarta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat sebagai berikut:

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Gambar 6 APK Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah DKI Jakarta



Sumber: Kemendikbudristek

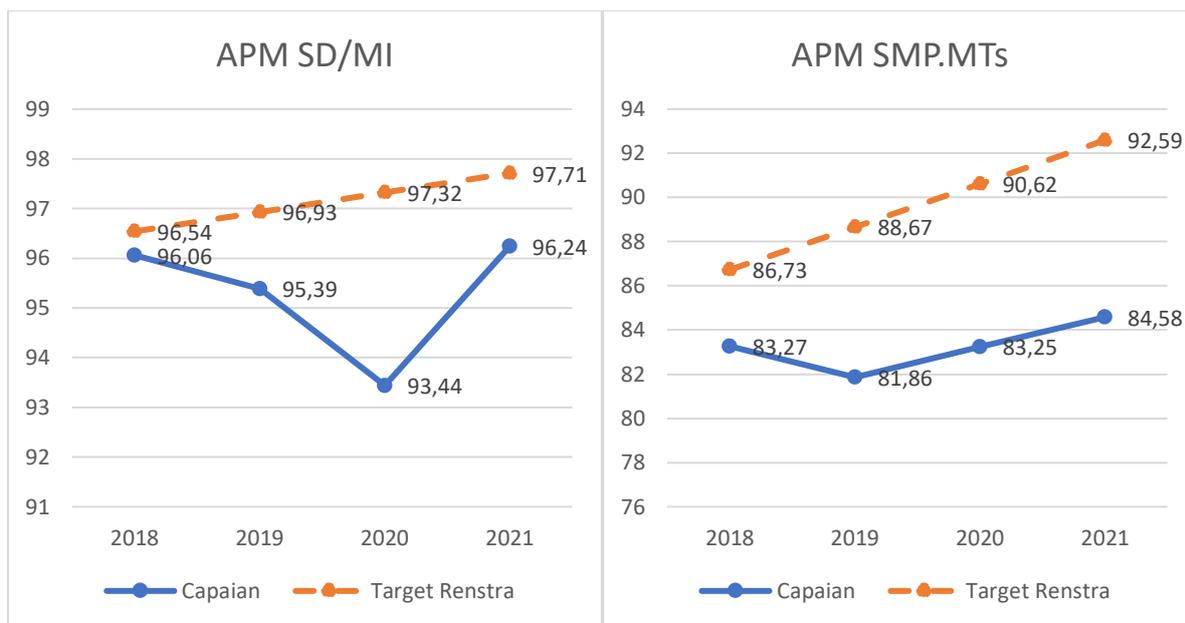
Pada data tersebut dapat dilihat pada jenjang SD/MI terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan APK dalam kurun waktu 2018-2021. APK Pada tahun 2021 sebesar 102,94 telah terjadi penurunan di bandingkan tahun 2018 sebesar 104,97 dan mencapai angka tertinggi di tahun 2020 sebesar 105,5. Selain itu penurunan juga terjadi pada jenjang SMP/MTs. APK di tahun 2021 sebesar 104,98 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 105,4. Menurunnya APK jenjang SD/MI, dan SMP/MTs disebabkan semakin berkurangnya populasi murid yang usianya diluar usia sekolah. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa semakin banyak anak-anak jakarta yang bersekolah sesuai dengan umurnya di jenjang yang tepat.

Pada jenjang SMA/MA dan SMK terlihat tren kenaikan APK. Di tahun 2021 APK sebesar 104,82, lebih besar di banding tahun 2018 yaitu 103,69. Hal ini menunjukkan semakin meluasnya akses pendidikan pada jenjang menengah bagi penduduk DKI Jakarta. Selain itu juga ini menunjukkan adanya populasi siswa yang usianya diluar batas usia sekolah pada jenjang tersebut. Yang disebabkan beberapa faktor yaitu pertama, terlambatnya anak sekolah dalam masuk jenjang pendidikan, dan kedua masih terdapat pengulangan kelas.

Perkembangan APM jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Gambar 7 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI



Sumber: Kemendikbudristek

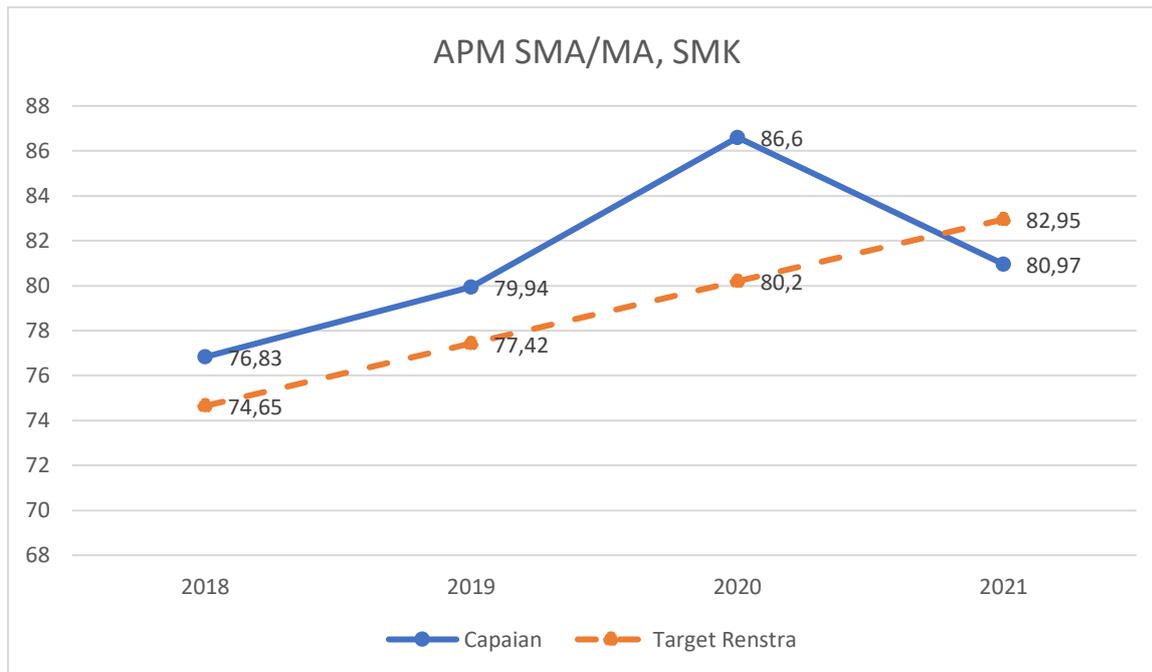
Angka Partisipasi Murni jenjang SD/MI mengalami tren fluktuasi, dan hanya mengalami kenaikan sedikit di tahun 2021 sebesar 96,24 dibanding tahun 2018 sebesar 96,06. Selama periode tersebut kinerja APM belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Kebijakan KJP Plus serta bantuan pendidikan kepada satuan pendidikan (BOS dan BOP) belum memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan APM jenjang SD/MI. Hal yang masih menjadi catatan dari data tersebut adalah masih terdapatnya anak-anak usia 7-12 tahun yang tidak bisa dan terlambat mengakses jenjang SD/MI. Perluasan penyaluran KJP dengan menyasar secara tepat kepada keluarga-keluarga sangat miskin perlu dilakukan serta dibarengi dengan penambahan ruang kelas baru untuk memenuhi daya tampung.

Pada jenjang SMP/MTs APM sempat mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu 81,86 dibandingkan tahun 2018 sebesar 83,27 dan kembali naik sampai tahun 2021 sebesar 84,58. Hasil indikator APM dari 2018-2021 belum ada yang mencapai target dari Renstra 2017-2022. Peningkatan dari tahun 2018-2021 sebesar 1,31. Hal ini terjadi karena masih belum cukupnya daya tampung sekolah dan belum seluruhnya anak usia jenjang SMP/MTs bisa bersekolah.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

APM jenjang SMA/MA dan SMK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8 APM SMA/MA dan SMK DKI Jakarta



Sumber: Kemendikbudristek

Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/MA dan SMK mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021. Kenaikan yang sangat besar terjadi di tahun 2020 sebesar 86,6 dibanding tahun 2018 sebesar 76,83. Namun kembali menurun di tahun 2021 menjadi 80,97. Capaian APM dari tahun 2018-2020 telah mencapai target Renstra. Peningkatan ini terjadi karena menurunnya angka putus sekolah serta terbukanya kesempatan belajar karena bantuan KJP. Sementara itu penurunan yang cukup besar di tahun 2021 terjadi karena banyak nya siswa yang bersekolah diluar usia 16-18 tahun.

Berbagai program kerja Dinas Pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan dilakukan melalui program prioritas seperti penyaluran bantuan KJP. Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Jumlah Penerima KJP Tahap 2 DKI Jakarta

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri	455.512	533.042	501.824	526.084	529.318
2	Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta	322.546	372.877	363.299	323.207	287.372
3	Jumlah Penerima KJP	778.058	905.919	865.123	849.291	816.690

Sumber: Dinas Pendidikan

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Jumlah siswa penerima Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dari tingkat SD sampai SMA pada tahun 2017 mencapai 778.058 yakni 455.512 dari sekolah negeri dan 322.546 dari sekolah swasta. Pada tahun 2018 jumlah penerima KJP Plus mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 905.919 siswa, dengan 533.042 siswa sekolah negeri, dan 372.877 siswa sekolah swasta. Setelah itu sampai tahun 2021 penerima KJP Plus mengalami penurunan dimana pada pencairan tahap 2 di tahun 2021 mencapai 816.690 siswa dengan 529.318 siswa dari sekolah negeri dan 287.372 siswa dari sekolah swasta.

Selain KJP Plus pemerintah DKI Jakarta juga memiliki program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang merupakan program pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi calon/mahasiswa PTN/PTS dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN/PTS dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 16 Jumlah Penerima KJMU

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penerima KJMU	2.191	4.542	8.790	10.264	11.812
2	Jumlah Universitas/ Perguruan Tinggi	68	85	101	112	113

Sumber: Dinas Pendidikan

Pada tahun 2017 saat pertama kali program KJMU di luncurkan telah memberikan bantuan kepada 2.191 siswa dan jumlah universitas 68. Pada tahun 2018 hingga 2021 jumlah penerima KJMU dan jumlah universitas yang dituju juga semakin bertambah. Tercatat pada tahun 2018 penerima KJMU naik menjadi 4.542 dengan jumlah universitas 85, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 8.790 dengan jumlah universitas 101. Pada tahun 2020 dan 2021 kenaikan mencapai 10.264 dan 11.812 penerima KJMU dengan jumlah universitas 113. Kenaikan jumlah penerima ini untuk perluasan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi bagi warga miskin di Jakarta.

Program pemberian KJMU pada bagi peserta didik juga memberikan dampak kenaikan APK Perguruan Tinggi di DKI Jakarta. Data APK Perguruan Tinggi dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 9 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Di Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Peningkatan APK Perguruan Tinggi Di Jakarta menunjukkan tren yang baik dimana dengan bantuan KJMU memberikan kesempatan warga miskin DKI Jakarta untuk berkuliah semakin besar. Peningkatan ini terlihat di tahun 2017 sebesar 34,94 dibanding di tahun 2021 naik sebesar 40,05. Perluasan penerima KJMU dari tahun 2018-2021 linier dengan peningkatan APK di Perguruan Tinggi.

Selain program KJP Dinas Pendidikan juga telah memprioritaskan rehab sekolah dan pembangunan unit sekolah baru untuk menambah daya tampung peserta didik sehingga akses semakin meluas dan merata. Berikut capaian jumlah sekolah yang telah di rehab dan di bangun.

*Tabel 17 Jumlah Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Pembangunan Unit Sekolah Baru*

Rehabilitasi Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
Rehab Total	93	90	133	0	4
Unit Sekolah Baru	0	3	10	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan

Rehab total dan pembangunan unit sekolah baru ditujukan untuk menambah daya tampung sekolah negeri. Untuk jumlah sekolah di DKI Jakarta pada 2021 mencapai 10.791, dengan rincian 2.233 (20,69%) merupakan sekolah negeri dan 8.558 sekolah swasta. Berikut pembagian jumlah sekolah berdasarkan jenjang dan wilayah.

*Tabel 18 Jumlah Satuan Pendidikan Setiap Jenjang*

Jenjang Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Total
PAUD & RA	165	4.907	5.072
SD & MI	1.469	1.384	2.853
SMP & MTS	335	997	1.332
SMA, SMK & MA	212	954	1.166
SLB	13	76	89
PKBM	39	240	279

Sumber: Dapodik tahun 2022

Untuk sebaran sekolah perwilayah administrasi dapat dilihat sebagai berikut

*Tabel 19 Jumlah Satuan Pendidikan per Wilayah*

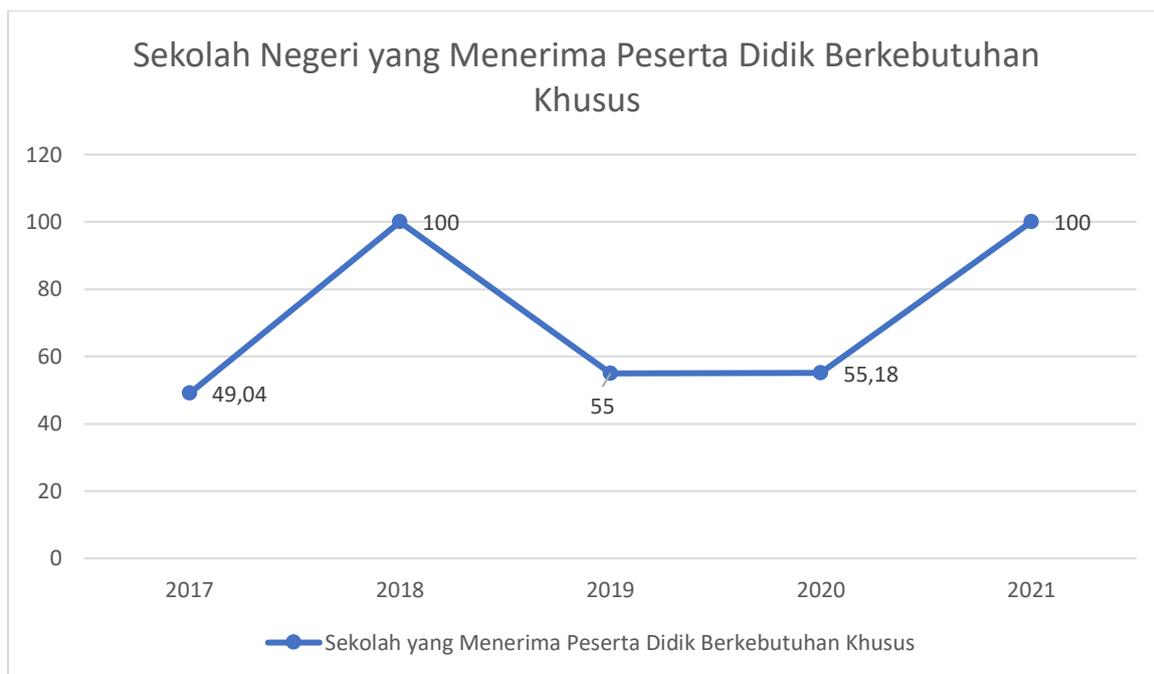
Wilayah Kota/Kabupaten	Jumlah Satuan Pendidikan
Kota Administrasi Jakarta Pusat	954
Kota Administrasi Jakarta Utara	1.368
Kota Administrasi Jakarta Barat	1.972
Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.901
Kota Administrasi Jakarta Timur	2.583
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	52

Sumber: Dapodik tahun 2022

Mulai tahun ajaran 2014/2015, seluruh sekolah negeri di Jakarta menampung siswa berkebutuhan khusus yang selama ini kesulitan memperoleh pendidikan. Pemprov DKI Jakarta tidak lagi membedakan anak didik berdasarkan kondisi fisik dan mental. Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pendidikan (Inklusif). Yakni pendidikan yang tidak membedakan anak berdasar kondisi fisik dan mental. Sampai Se jauh ini persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus ada sebesar 1.997 sekolah dan jumlah siswa inklusi sebanyak 15.232 per Desember 2020.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Gambar 10 Persentase Sekolah Negeri yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus



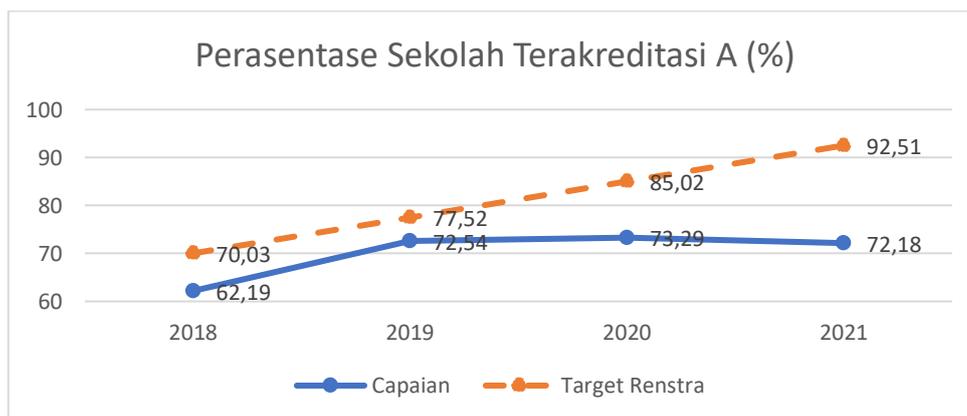
Sumber: Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah negeri yang menerima anak berkebutuhan khusus mengalami fluktuasi sejak tahun 2017 sampai 2021. Hal ini karena terdapat sekolah yang tidak memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu belum semua sekolah negeri memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) sehingga masih terkendalanya proses belajar mengajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

## B. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan sekolah dan sebagai upaya memetakan mutu dan potensi sekolah di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melakukan pengelompokan/klasterisasi sekolah, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Persentase sekolah yang terakreditasi A menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di DKI Jakarta yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Gambar 11 Persentase Sekolah Terakreditasi A



Sumber: Dinas Pendidikan

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Sekolah yang telah terakreditasi A sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 telah mengalami peningkatan. Program BOS dan BOP telah mampu membantu sekolah-sekolah (terutama sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Peningkatan cukup besar terjadi di tahun 2019 sebesar 72,54, namun terjadi penurunan di tahun 2021 sebesar 72,18. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2018 namun masih jauh dari target Renstra yang telah di tentukan. Hal ini karena kuota dari BAN S/M terbatas, sehingga jika terdapat sekolah yang secara standar pendidikan sudah setara dengan akreditasi A namun belum mendapat kuota untuk di akreditasi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya sertifikasi terhadap guru untuk memperoleh standar kompeten dalam menunjang aktifitas pendidikan. Persentase guru yang kompeten adalah jumlah guru yang mendapatkan nilai minimum Uji Kompetensi Guru dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Berikut gambaran persentase guru yang kompeten di Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 20 Presentase Guru Kompeten yang Memenuhi Nilai Standar UKG

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Guru yang Kompeten	72,16	8,25	51,49	1,02	1,02

Sumber Kemendikbudristek

Dari data di atas di tahun 2017 presentase guru yang kompeten memenuhi nilai UKG mencapai 72,16%, namun di tahun 2018 menurun menjadi 8,25% karena Kemendikbudristek menaikkan nilai minimum UKG dari yang sebelumnya 50 menjadi 80. Di tahun 2020 dan 2021 UKG berhenti karena pandemi Covid 19 sehingga presentase guru yang memenuhi nilai minimum UKG hanya 1,02%. Tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada para Guru ternyata tidak linier dengan peningkatan mutu guru. Terdapat variabel mengapa guru yang kompeten masih rendah di Jakarta yaitu kebijakan pendidikan, pola pelatihan, pola rekrutmen calon guru, pola redistribusi, bentuk reward and punishment, kultur birokrasi, dan sampai kepada penciptaan iklim yang adil di antara para guru, apapun statusnya secara administratif.

Dari masih rendahnya persentase Guru yang kompeten dengan indikator nilai UKG, hal ini membuat perubahan indikator di Renstra Kemendikbudristek untuk mengukur kualitas guru, hal ini karena variabel UKG sebagai satu-satunya mengukur kualitas guru sudah tidak relevan. Maka Kemendikbudristek menggunakan istilah Guru profesional dengan berbagai macam variabel, yaitu guru yang telah PPG, guru yang berpendidikan minimal S1, dan guru penggerak.

Persentase kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Persentase Kelulusan siswa di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren perkembangan positif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Angka Kelulusan Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,98	100	100	99,96	99,99
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,99	100	99,99	99,98	99,99

Sumber: Dinas Pendidikan

Pada jenjang SD/MI selama tahun 2017 sampai 2021 mengalami persentase kelulusan sebesar 100%, hal ini tentu akan dipertahan oleh dinas Pendidikan. Pada jenjang SMP/MTs persentase kelulusan tahun 2017 mencapai 99,98% dan mengalami peningkatan menjadi 100% pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 99,98% dan kembali

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

meningkat di 2021 sebesar 99,99%. Besarnya angka kelulusan siswa di semua jenjang digunakan untuk pemetaan dan perbaikan kebijakan.

Rata-rata nilai ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis daerah SD,SMP,SMA, SMK bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan hasil pendidikan yang telah dijalani selama jenjang pendidikan untuk bisa mengukur seberapa besar angka nilai ujian nasional pada setiap jenjang pendidikan yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.

*Tabel 22 Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Provinsi DKI Jakarta*

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	70,11	63,4	69,69	81,5	82,51
2	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	62,32	59,5	60,71	80,16	80,61
3	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	61,57	63,7	66,9	81,31	82,82
4	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	61,31	65,5	51,41	80,28	79,15

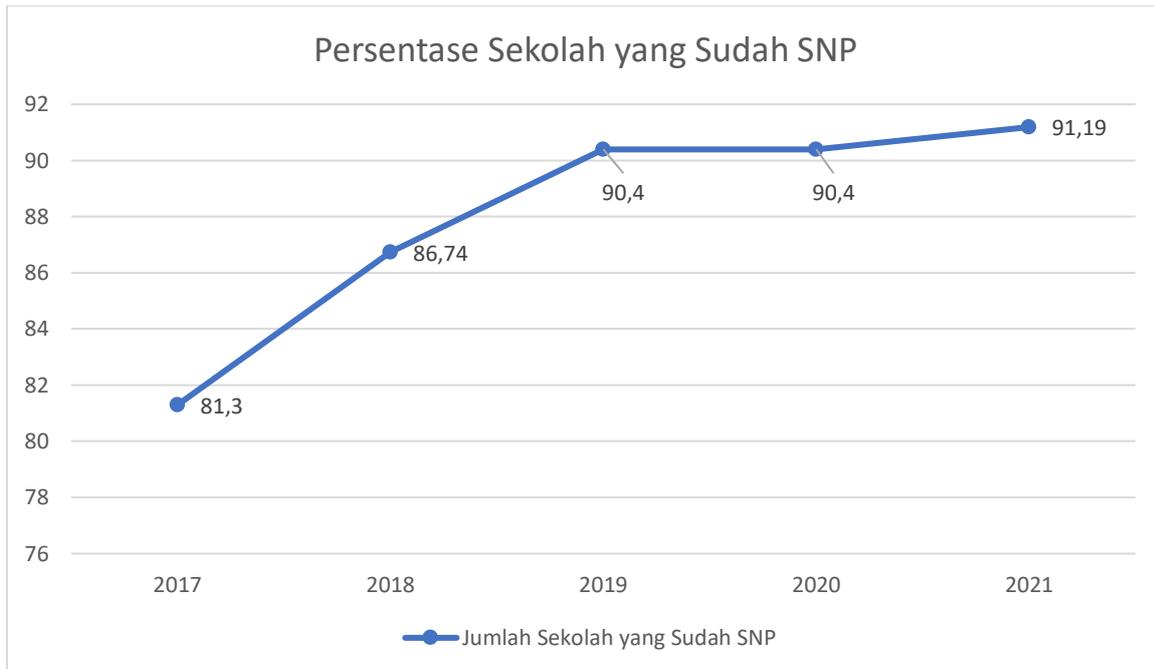
Sumber Dinas Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Nilai Ujian Nasional pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD/MI tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 70,11 menjadi 63,4 di 2018. Untuk Jenjang SMP/MTs di tahun 2018 juga mengalami penurunan nilai yaitu 59,5 dimana sebelumnya di tahun 2017 sebesar 62,32. Sementara untuk jenjang SMA/MA mengalami kenaikan secara beruntun dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk jenjang SMK terjadi penurunan yang sangat besar pada tahun 2019 dengan nilai 51,41. Pada tahun 2020 dan 2021 untuk semua jenjang tidak ada Ujian Nasional karena sudah tidak relevan yang akan diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi dengan parameter nilai literasi dan numerasi. Selain itu adanya pandemi covid 19 juga mendorong dipercepatnya peniadaan UN dan digantikan dengan Ujian berbasis sekolah hal ini sehingga nilai rata-rata ujiannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Untuk terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan menjadikan pendidikan sebagai sasaran prioritas nasional dimana perlu adanya peningkatan akses sarana dan prasana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat terwujudnya percepatan pemerataan akses infrastruktur fisik dan non fisik. Berikut gambaran sekolah negeri yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2021:

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Gambar 12 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2021



Sumber BPMP DKI Jakarta

Pada tahun 2017 sekolah yang memiliki sarana dan prasana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 81,3% dan mengalami kenaikan sampai tahun 2021. Peningkatan di tahun 2020-2021 cukup kecil karena terjadi pemotongan anggaran untuk rehab total dan rehab sedang akibat dampak pandemi covid 19.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Untuk dapat menstandarkan pelayanan Lembaga kursus dan pelatihan, maka dilaksanakan akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan beserta program PNF berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 23 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi per tahun	121	95	105	0	0

Sumber Kemendikbudristek

## C. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Revitalisasi Pendidikan Kejuruan merupakan program dalam menyiapkan peserta didik jenjang SMK untuk terserap didunia kerja dan industri. Pendidikan kejuruan pada dasarnya menyiapkan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi namun memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan oleh DUDI. Dinas Pendidikan telah melaksanakan program revitalisasi SMK dengan melakukan sinkronisasi kurikulum dengan DUDI dan mengembangkan SMK Unggulan. Sampai pada tahun 2021 total jumlah SMK Pusat Keunggulan telah mencapai 19 SMK.

Dari hasil program revitalisasi SMK, Dinas Pendidikan telah mencatatkan capaian dimana pada tahun 2021 tingkat penyerapan lulusan SMK di DUDI baru mencapai 22,54%. Hal ini menunjukkan belum semua SMK memiliki kurikulum link and match dengan DUDI. Selain itu faktor lainnya adalah banyak SMK yang kualitas pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Rendahnya tingkat penyerapan ini juga menjadi indikator bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT P2KPTK2 belum bisa menjawab kebutuhan industri. Program sertifikasi peserta didik harus menyesuaikan kebutuhan peralatan yang terbaru, sehingga para peserta didik memiliki kecakapan teknis yang dibutuhkan DUDI.

Dalam hal manajemen persekolahan, Dinas Pendidikan mendorong agar SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Dalam bidang pendidikan tujuan utama penerapan BLUD adalah meningkatkan mutu pendidikannya. Dalam melaksanakan BLUD, SMK diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga memiliki otoritas dalam pengelolaan pendapatan atas hasil unit usahanya. Selain itu hal ini bertujuan agar kompetensi siswa mengalami peningkatan karena dikelola dengan profesional dan memiliki pengalaman langsung dalam bekerja. Sampai pada tahun 2021 total 12 BLUD yang sudah terbentuk.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## 2.3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 24 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<b>Dinas Pendidikan (Total)</b>	13.930.995.548.164	15.458.145.865.091	15.677.466.473.087	10.200.708.119.032	16.713.000.371.453	12.170.031.138.346	13.819.837.271.280	14.438.299.845.552	8.939.038.331.519	16.006.138.119.519	87,36	89,40	92,09	87,63	95,77	10,32%	14,74%
<b>Dinas Pendidikan</b>	12.132.090.703.890	13.495.762.610.485	13.141.464.155.688	9.250.281.837.459	16.475.551.219.854	10.685.091.228.058	12.335.953.425.088	12.291.587.950.401	8.211.547.546.504	15.790.540.274.797	88,07	91,40	93,53	88,77	95,84	14,28%	14,83
<b>Suku Dinas</b>	1.737.118.343.215	1.905.273.400.963	2.445.801.889.498	908.868.486.053	195.616.571.185	1.322.894.180.354	1.434.956.884.599	2.064.226.807.777	688.538.291.186	175.894.652.158	82,53	75,31	84,39	75,75	89,91	(-20,42%)	(-17,75%)
<b>UPT</b>	61.786.501.059	42.333.277.098	74.004.672.205	27.409.024.920	31.285.278.016	60.099.224.277	37.624.042.404	68.962.831.235	26.617.940.840	29.617.631.819	82,92	88,87	93,18	97,11	94,66	(-1,09%)	(-0,84%)
Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	-	14.776.576.545	14.211.511.450	6.291.021.329	4.628.315.266	-	11.302.919.189	11.704.285.816	6.131.953.168	4.396.105.552	-	76,49	82,35	97,47	94,98	(-8,28%)	(-18,08%)
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta	-	-	239.029.000	3.242.799.767	2.672.285.322	-	-	236.696.600	2.501.107.950	2.595.587.965	-	-	99,02	77,12	97,12	412%	319%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta	-	-	208.245.000	2.142.283.311	1.641.998.861	-	-	80.760.000	1.584.930.782	1.494.639.887	-	-	38,78	73,98	91,02	301,55	618%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	-	-	1.536.970.246	2.472.666.193	1.604.702.949	-	-	1.500.513.723	2.116.561.089	1.599.227.341	-	-	97,62	85,59	99,65	8,59%	5,53%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### Analisis SWOT

Tantangan dan peluang pembangunan di Provinsi DKI Jakarta Antara Lain.

Tantangan:

- a. Provinsi DKI Jakarta tidak akan lagi menjadi Ibu Kota Negara pada tahun 2024
- b. Banyaknya pendatang yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan
- c. Kualitas pelayanan pendidikan di satuan Pendidikan belum merata
- d. Adanya tuntutan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua

Peluang:

- a. Anggaran Memadai  
Sesuai amanat Undang-undang bahwa urusan pendidikan mendapat porsi minimal 20% dari APBD sehingga dalam penetapan APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan mendapat anggaran yang cukup memadai. Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan peluang sekaligus kekuatan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dan ketersediaan anggaran yang memadai tentu harus dimanfaatkan dengan tepat dan benar.
- b. Sarana Prasarana memadai.  
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas dilima wilayah kota, dan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) serta sekolah-sekolah negeri memiliki asset sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sarana prasarana yang perlu peningkatan dan penyesuaian namun secara umum sarana prasarana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memadai dan dapat diandalkan.
- c. Perhatian / dukungan Pimpinan Pemerintah Provinsi Tinggi.  
Perhatian Gubernur Provinsi DKI Jakarta tinggi terhadap pembangunan pendidikan. Perhatian yang tinggi juga terlihat pada pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perhatian yang tinggi ini dapat terlihat pada rapat – rapat kerja, baik dengan pimpinan pemerintah daerah maupun pimpinan DPRD DKI Jakarta sehingga menghasilkan kebijakan dan program-program yang sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta.
- d. Peran serta Masyarakat Tinggi  
Peran serta masyarakat yang tinggi ini ikut membantu akselerasi program pendidikan di DKI Jakarta. Aktualisasi peranan masyarakat yang tinggi ini dapat terlihat pada kegiatan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Badan Akreditasi Sekolah dan Yayasan pembina penyelenggara sekolah swasta. Semua organisasi masyarakat tersebut dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- e. Potensi Pemanfaatan Peran Serta Dunia Usaha / Dunia Industri  
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia juga sebagai pusat aktifitas dunia usaha dan dunia industri. Karena itu jumlah dunia usaha dan dunia industri di provinsi DKI Jakarta banyak. Hal tersebut tentu merupakan peluang bagi pemerintah untuk menstimulir pemberdayaan peranan DUDI dalam pendidikan. Apalagi pada perusahaan dagang, jasa, dan industri memiliki program yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
- f. Jakarta sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis  
DKI Jakarta pada tahun 2024 tidak akan lagi menjadi ibukota Negara Republik Indonesia. Melalui RPD 2023-2026 Jakarta akan menjadi kota metropolitan dan pusat bisnis. Hal ini tentu akan menjadi peluang bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan kotanya karena banyak pusat-pusat bisnis. Sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis akan banyak manusia dengan beragam latar belakang sosial, dan ekonomi yang mengakibatkan interaksi yang beragam dari setiap warganya

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Analisa
1	Pelayanan terhadap siswa dan akses pendidikan	Masih terdapatnya angka putus sekolah	Belum terdatanya secara menyeluruh peserta didik yang berasal dari keluarga miskin
		APK PAUD yang masih jauh dari target	Kurangnya Guru mengakibatkan berkurangnya jumlah rombel.  Masih kurangnya kesadaran masyarakat
		APM jenjang pendidikan menengah masih cukup rendah	Belum cukupnya daya tampung dan belum meratanya akses sekolah di setiap wilayah DKI Jakarta
		Masih kurangnya jumlah SLB	Belum dilakukannya pemetaan kebutuhan SLB
		Rata-rata lama sekolah belum mencapai target di angka 12 tahun	Masih rendahnya APM jenjang menengah
		Masih rendahnya nilai literasi dan numerasi	Belum meratanya mutu pendidikan dan kualitas pendidik
2	Pelayanan Terhadap Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi standar Kompetensi	Masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di Provinsi DKI Jakarta
		Kurangnya Pendidik dan Tenaga Pendidik untuk jenjang SLB	Belum sinkronnya pemetaan pemenuhan kebutuhan guru untuk SLB
3	Prasarana dan Sarana Pendidikan	Masih terdapat gedung sekolah yang perlu direhab total/berat	Terbatasnya anggaran Dinas Pendidikan
		Masih kurangnya gedung SLB Negeri	Terbatasnya anggaran pembangunan sekolah baru, dan belum adanya program prioritas untuk akses ABK

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

		Masih terdapatnya sekolah negeri yang belum memiliki prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar	Terbatasnya anggaran untuk melakukan rehab total.
		Terdapat beberapa aset (lahan) yang dikelola dinas pendidikan belum kuat bukti kepemilikannya	Belum adanya sistem untuk pendataan aset-aset pemerintah yang idle
		Sulitnya mencari lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dalam rangka peningkatan daya tampung	Ketersediaan Lahan yang sangat terbatas di DKI Jakarta dan harganya terus melambung
		Belum adanya sistem yang terintegrasi terkait data lahan-lahan idle milik Pemprov DKI antara BPAD dan Disdik dalam pengadaan lahan sekolah baru.	Perlunya penataan asset yang komperhensif dengan
4	Pendidikan Vokasi	Masih rendahnya penyerapan lulusan dunia kerja di DU/DI	Masih cukup banyak SMK yang belum link and match dengan DUDI
		Masih cukup rendah kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK 70,3%
		Lingkup kerjasama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Industri masih belum maksimum sesuai 8 SNP	Masih kurangnya kualitas kepemimpinan dan SDM di SMK untuk bisa bekerja sama dengan DUDI
		Belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama DUDI	Masih kurangnya kualitas kepemimpinan dan SDM di SMK untuk bisa bekerja sama dengan DUDI
		Belum semua SMK memiliki fasilitas standar DU/DI	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan peralatan
		Sinergi pemangku kepentingan termasuk DU/DI dalam pengembangan SMK masih kurang	Masih kurangnya kualitas kepemimpinan dan SDM di SMK untuk bisa bekerja sama dengan DUDI
		Kesempatan peningkatan kompetensi pendidik, kepala sekolah, dan pengawas SMK yang sesuai dengan DU/DI masih sedikit	Tidak sesuai nya narasumber dan bahan ajar yang disediakan P2KPTK2

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

			dengan kebutuhan SMK
		Belum tercapainya link and match antara kompetensi dan kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan DU/DI di semua SMK	Masih kurangnya kualitas kepemimpinan dan SDM di SMK untuk bisa bekerja sama dengan DUDI
		Masih rendahnya jumlah SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan: 51.00%
5	Pendidikan PAUD dan Dikmas	Rendahnya Satuan PAUD yang telah melaksanakan PAUD Holistik Integratif	Belum meratanya kualitas pendidik dan sarana prasarana
		Belum semuanya Satuan Pendidikan PAUD terakreditasi	Terbatasnya kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional
		Peserta Didik Kesetaraan tidak memiliki kompetensi keterampilan untuk memasuki dunia usaha dan dunia kerja	Belum adanya kerjasama antara Bidang PAUD Dikmas untuk bekerja sama dengan DUDI
		Belum terpenuhi PTK sesuai kebutuhan pada PAUD N dan PKBM N	Belum dilakukan pemetaan terkait kebutuhan Guru dan Tendik untuk seluruh wilayah DKI Jakarta

Dengan diberlakukannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, seharusnya kepala sekolah dapat menggunakan otonomi lebih besar untuk mengelola sekolah dengan segala sumber daya yang ada untuk mencapai hasil semaksimal mungkin, sehingga hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik, karena semua keputusan yang terkait dengan kepentingan sekolah dapat diambil secara tepat oleh setiap sekolah. Namun dalam kenyataannya, masih ada yang menerjemahkan otonomi dengan tetap masih harus menunggu juklak dan juknisnya dari birokrasi di atasnya, karena takut disalahkan. Padahal keputusan yang terkait dengan kepentingan internal sekolah ada di tangannya. Yang dibutuhkan saat ini adalah wawasan yang luas tentang pengelolaan lembaga pendidikan, sikap positif, keberanian, kejujuran dan tanggungjawab dari seorang kepala sekolah, sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dari evaluasi dan temuan di lapangan secara spesifik dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Masih banyak sekolah yang belum menyusun dan menerbitkan Rencana Induk (strategis) Pengembangan Sekolah yang dikenal dengan sebutan RIPS, sebagai bahan perencanaan operasional sekolah berdasarkan tahapan (tahun per tahun), cenderung yang terlihat, perencanaan satu dan lainnya seringkali kurang saling mendukung, berdiri sendiri, kurang berkesinambungan dan belum berkelanjutan.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) perlu peningkatan penyempurnaan, prinsip-prinsip MBS secara filosofis dan konseptual perlu pemahaman secara utuh, sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi antara sekolah satu dengan lainnya. Pluralisme dalam implementasi dapat di

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

pahami sebagai akibat keanekaragaman, tetapi seharusnya secara esensial dan substansial seharusnya persepsi komunitas sekolah terhadap MBS adalah sama, yakni tujuan MBS adalah mengembangkan sekolah berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di sekolah tersebut.

Kemampuan inovasi dan inisiatif untuk berkreasi positif dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) relatif masih rendah, terlihat dari kecenderungan pola RKAS dari sebagian besar sekolah hampir sama, sangat terpaku pada hitam putihnya pedoman yang diterbitkan dan diarahkan oleh pihak birokrasi. Permasalahan seringkali muncul mulai dari penyusunan persiapan mengajar, sosialisasi kurikulum, pemahaman makna kurikulum, pemahaman dan pengembangan lingkup materi yang harus diajarkan dan dipelajari siswa, jenis buku yang harus digunakan siswa dan guru.

Pencapaian standar minimal kurikulum, juga masih menjadi masalah, karena ketika mengikuti ujian nasional berbasis kompetensi yang soalnya disusun berdasarkan kurikulum nasional, ternyata masih banyak peserta didik lulus dengan nilai rata-rata keberhasilannya masih belum memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat masalah yang cukup serius di dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penerapan strategi dan metodologi pembelajaran, alokasi waktu belajar khususnya durasi waktu perjam pelajaran tatap muka, pemenuhan materi kurikulum.

Secara filosofis, kurikulum harus memuat empat hal pokok, meliputi pertama: tujuan yang akan dicapai, kedua: materi yang akan diajarkan, ketiga: cara dan metode mengajar yang harus digunakan (proses pembelajaran), dan keempat: yaitu evaluasi belajar. Jika keempat hal pokok tersebut diperhatikan secara benar oleh para penyelenggara dan pelaksana pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih berhasil.

Permasalahan khusus untuk SMK, masih mengalami kendala dalam melibatkan dan mendapatkan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai tempat praktik kerja industri bagi peserta didiknya. Untuk membantu meningkatkan kualitas praktik bagi peserta didik dari SMK negeri dan swasta, pemerintah DKI Jakarta perlu memaksimalkan P2KPTK2 untuk bisa menyesuaikan Narasumber, dan peralatan pelatihan yang sesuai dengan DUDI. perlu dibuat "blue print" pengembangan dan peningkatan fungsi P2KPTK2 sebagai "Learning Center" dalam pelatihan dan praktik bagi peserta didik SMK, dengan mengedepankan pengembangan konsep "Core Bisnis" yang menjadi unggulan dari masing-masing P2KPTK2 pada setiap wilayah. Mengupayakan penataan dan peningkatan kemampuan berkeahlian tenaga teknis dan staf P2KPTK2 dalam mengembangkan program pelatihan dan praktik yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.

Berbagai masalah tentang ketenagaan meliputi antara lain : kemampuan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan masih ada yang kurang profesional, kinerja yang masih rendah dan kurang produktif, masih banyaknya tenaga pendidik yang berstatus non PNS dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan tenaga pendidik PNS. Belum tersedianya konsep pembinaan dan pengembangan karir yang bersifat komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta belum tertata dengan baik. Selain itu, mekanisme dan prosedur standar juga belum dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (prinsip 'the right man on the right place'), demikian pula dengan penempatan jabatan belum berjalan dengan semestinya.

Secara spesifik permasalahan tersebut diatas dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sebagian besar Sekolah Swasta belum memiliki guru Bimbingan dan Konseling (BK);

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

2. Belum tersedianya guru BK di SD Negeri, padahal permasalahan psikologis dan perilaku telah banyak terjadi di kalangan murid-murid SD yang sungguh membutuhkan penanganan intensif dan terprogram.
3. Belum terpenuhinya rasio kebutuhan SDM pengawas sekolah;
4. Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi kependidikan yang memenuhi persyaratan minimal (S1) khususnya pada jenjang pendidikan dasar
5. Kurangnya kemampuan mendidik tenaga pendidik dan kependidikan;
6. Masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi di bawah standar yang ditetapkan;
7. Penerapan sistem penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan angka kredit, belum berdampak positif pada kualitas profesionalisme dan kesejahteraannya;
8. Belum terlaksananya sistem dan prosedur mutasi (promosi, demosi dan rotasi) bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
9. Belum terpenuhinya kebutuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

Distribusi anggaran untuk pembiayaan kebijakan peningkatan dan relevansi, pemerataan kesempatan belajar, dan perbaikan manajemen sekolah, tampaknya masih belum proporsional di sebabkan karena keterbatasan kemampuan perencana pendidikan dalam melihat dan menetapkan prioritas pembiayaan. Mutu hasil pendidikan lebih dilihat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, belum mampu dijabarkan dalam program perencanaan yang memadai. Akibatnya, perencana pendidikan lebih piawai menyusun perencanaan dengan bobot pembiayaan terbesar pada aspek "hardware", sementara aspek "software"nya kurang mendapat perhatian yang serius.

Pada tataran implementasi anggaran pendidikan di sekolah, tampaknya "taat azas" untuk mewujudkan prinsip produktifitas dan profitabilitas masih jauh dari harapan, karena kemampuan untuk mengimplementasikan azas efisien dan efektifitas masih belum dipahami secara utuh. Masih ditemui komponen pembiayaan yang seharusnya tidak relevan dengan substansi kegiatan, sebagai akibat rendahnya kemampuan untuk menganalisis hubungan antara :

1. Sumber daya yang di butuhkan untuk satu kegiatan,
2. Waktu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut,
3. Besaran biaya yang dibutuhkan untuk itu, serta
4. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut beserta implikasi dan dampaknya

Pemahaman masyarakat akan filosofi "human investment" dan "human capital" masih relatif rendah, menimbulkan persepsi bahwa pendidikan adalah termasuk kategori "high cost" bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga mengakibatkan munculnya sikap apatisisme dan resistensi masyarakat, terutama kelompok masyarakat "kurang mampu" terhadap berbagai persoalan pendidikan, termasuk pembiayaannya.

Secara umum masih ada permasalahan dalam sarana dan prasarana antara lain, distribusi sarana dan prasarana serta perlengkapan pendidikan belum merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah, terutama berkenaan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Masih cukup banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar kurikulum, terutama pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Perubahan kurikulum telah berjalan, namun tidak jarang ditemui pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pembelajaran masih mengikuti tuntutan dan standar kurikulum lama, sehingga seringkali menyulitkan guru dalam

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

mengoperasionalkan kurikulum secara lebih optimal guna mendapatkan hasil yang optimal pula. Ketersediaan peralatan, media dan sumber belajar untuk sekolah masih jauh dari kebutuhan.

Sesuai dengan sifat otonomi edukatif yang melekat dengan penyelenggaraan sekolah, sudah seharusnya dipikirkan bahwa perencanaan, dan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan tersebut terutama yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di sekolah, dilaksanakan langsung oleh pihak sekolah, tanpa harus menunggu droping dari institusi pembina di atasnya. Dan yang tidak kalah penting adalah masalah regulasi yang bernuansa desentralisasi pendidikan (educational desentralization). Terlihat sekarang, lebih cenderung dikatakan bahwa di dunia pendidikan "desentralisasi yang sentralistik", kewenangan sekolah, misalnya untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran dipasung oleh regulasi yang ada, yang sebetulnya masih bersifat sentralistik.

Di dalam membina hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu stakeholdernya, masih banyak ditemukan berbagai masalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum terealisasi dengan baik.
2. DU/DI masih belum memberikan kontribusi yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
3. Masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, masih belum berperan sebagaimana mestinya.
4. Masyarakat sebagai salah satu potensi sumber dana, belum diberdayakan secara proporsional.
5. Masyarakat sebagai salah satu sumber belajar nyata yang ada dilingkungan sekolah, belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
6. Peranan masyarakat sering hanya terbatas pada pemungutan berbagai sumbangan dana, yang cenderung memberikan kesan negatif terhadap keberadaan sekolah.
7. Peran pengawas sekolah, belum mencerminkan suatu sinergi antara kekuatan sekolah dan kekuatan masyarakat untuk memajukan sekolah yang bermutu.
8. Masih terdapat pengawas sekolah yang belum melaksanakan fungsinya secara benar sesuai ketentuan sehingga menghambat proses penyelenggaraan pendidikan.

Ekosistem pendidikan merupakan hal penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Secara umum terdapat tiga elemen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung:

## 1. Keluarga

Berdasarkan Permendikbud No. 30/2017 tentang Pelibatan Keluarga dinyatakan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pendidikan kesetaraan tentunya bukan sekolah atau Lembaga Pendidikan saja tetapi melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang berperan penting dalam mendidik dan mengarahkan setiap peserta didik menuju arah yang jelas dan benar adalah keluarga/orang tua, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, secara garis besar lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan orang tua adalah pendidik yang utama. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar orang tua merupakan pendidik yang paling kurang persiapannya. Artinya, orang tua atau calon orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi orang tua yang memadai dalam mendidik anak-anaknya. Setiap orang tua siap atau

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

tidak siap berkewajiban mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan, hingga anak menyelesaikan pendidikannya di sekolah.

Peran orang tua sebagai pendidik utama di keluarga menjadi sangat penting. Walaupun orang tua tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk menjadi orang tua sebagaimana mempersiapkan calon pendidik atau calon guru. Sementara keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua di sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan anak. Antara lain, bagi peserta didik mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, kesadaran terhadap kehidupan yang sehat, dan meningkatkan perilaku positif; bagi orang tua memperbaiki pandangan terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; serta bagi sekolah memperbaiki iklim sekolah, meningkatkan kualitas sekolah, dan mengurangi masalah kedisiplinan.

Bentuk pelibatan keluarga/orang tua di sekolah/penyelenggara pendidikan, antara lain, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan satuan pendidikan: mengikuti kelas orang tua/wali, menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan: berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran; berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak; bersedia menjadi anggota komite sekolah; berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah; menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan; berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain (napza); dan memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan.

Berkomunikasi dengan orang tua merupakan salah satu tanggung jawab sekolah. Demikian juga dengan orang tua, perlu menjalin komunikasi dengan sekolah. Komunikasi timbal balik ini, akan sangat efektif untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anak. Orang tua dan pendidik saling berbagi informasi, baik mengenai program sekolah maupun tentang individu anak. Orang tua dapat mengetahui program-program yang akan dan sedang dilaksanakan di sekolah. Di samping itu, juga dapat memberi saran serta kritikan tentang pelaksanaan program-program dan saling kerja sama demi kemajuan sekolah.

Sekolah juga dapat menginformasikan dan berdiskusi tentang perkembangan anak selama mengikuti kegiatan di sekolah. Sekolah juga dapat menggali informasi dari orang tua tentang berbagai hal mengenai anak tersebut. Kegiatan berkomunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara formal maupun informal, baik tertulis maupun secara lisan.

## 2. Alumni

Bahwa sebenarnya sekolah atau satuan Pendidikan memiliki aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berperan dalam kemajuan dan pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah selain aset yang ada baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di lembaga tersebut. Aset SDM yang dimaksud disini adalah para alumni dari sekolah/satuan pendidikan yang tergabung dalam komunitas atau perkumpulan organisasi yang mereka bentuk.

Alumni adalah SDM yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah, akan tetapi dalam berbagai kesempatan peranan alumni dalam memajukan kualitas sekolah sering terabaikan. Padahal alumni adalah aset penting yang dimiliki oleh sekolah yang harus dirangkul dan dikembangkan. Keberhasilan pendidikan di suatu lembaga pendidikan salah satu indikator utamanya adalah dengan melihat keberhasilan para alumninya. Baik dalam menjalani pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam berbagai bidang pekerjaan yang mereka jalani sesuai dengan bakat mereka.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## 3. Masyarakat

Peran masyarakat pendidikan merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran masyarakat pendidikan berarti keterlibatan masyarakat yang memahami pendidikan dalam berbagai bentuk. Keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya peran aktif dalam masyarakat ini diharapkan dapat menyukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan dan agar sekolah dapat berfungsi dengan baik. Peran serta masyarakat pendidikan diharapkan dapat:

- a. Membentuk kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan;
- b. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan;
- c. Mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan;
- d. Meningkatkan kinerja sekolah yang berarti pula meningkatnya produktivitas kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses, dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan serta komitmen dari pelaksana pendidikan;
- e. Kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, ikut dalam pertemuan, ikut malam kesenian, ikut bazar, pemberian bantuan tenaga ahli, pengadaan dan pemberian tenaga pendidikan, pendirian dan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan di luar di semua jenjang, pengadaan dana dan pemberian bantuan berupa wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- f. Pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan pemerintah;
- g. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- h. Pemberian bantuan merupakan pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan penyelenggaraan, pengembangan pendidikan.

## 4. Dunia Industri

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kebijakan dan aturan yang diterapkan pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan tidak akan bisa mencapai tujuan jika tidak ada dukungan dari masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan konsep Jakarta sebagai kota kolaborasi. Pemerintah DKI Jakarta memilih untuk melihat pembangunan Jakarta merupakan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk berkiprah. Tidak dimonopoli oleh pemerintah. Hanya dengan berkolaborasi itulah semua permasalahan di Jakarta akan bisa terselesaikan dengan baik, termasuk dunia pendidikan.

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, dan pembiayaan pendidikan yang mencukupi. Mengingat kemajemukan warga DKI Jakarta terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial kemanusiaan dengan tujuan akhir untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Jakarta.

Hubungan masyarakat dan pemerintah harus saling melengkapi dan menguatkan. Hal ini termasuk perilaku dunia usaha khususnya sektor swasta harus menyadari perannya sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Sejalan pula dengan konsep Program Merdeka Belajar Kemendikbudristek yang merupakan kolaborasi dari berbagai pihak baik keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, serta masyarakat secara luas. Sehingga dengan tingginya partisipasi masyarakat terutama dunia usaha dan industri (DUDIKA) dalam dunia pendidikan maka tujuan negara dalam mencerdaskan bangsa akan segera tercapai.

Selama ini yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam bekerjasama dengan Dunia usaha dan Industri yaitu dalam hal peningkatan kualitas pendidikan vokasi di SMK. Diantaranya melakukan pelatihan untuk guru, sebagai tempat praktik siswa, memberikan bantuan peralatan, mengadakan kelas industri dan atau langsung menyerap lulusan SMK yang dipekerjakan.

## 3.2 Telaahan Resntra K/L

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi didalam dokumen Renstra Kemendikbudristekristek 2020-2024 yang berisi tentang sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Pada sasaran Renstra Kemendikbudristekristek terdapat 5 poin sasaran yang akan menjadi perhatian dan acuan bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam menyusun Renstra 2023-2026.

Terdapat dua Agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait langsung dengan Pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi dari Kemendikbudristek. Kedua agenda tersebut dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui arahan dan strategi kebijakan sebagai berikut:

*Tabel 25 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;</li><li>2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;</li><li>3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;</li><li>4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan</li></ol>

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

			<p>pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;</p> <p>5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;</p>
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing	<p>1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan</p> <p>2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.</p>
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<p>1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</p> <p>2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;</p> <p>3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.</p>
3		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	<p>1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga;</p> <p>2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</p> <p>4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan</p> <p>5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</p>
4		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	<p>1. peningkatan budaya literasi;</p> <p>2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan</p> <p>3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi</p>

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Tabel 2.26 menjadi pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Kemendikbudristek. Arah Kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan mengikuti kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kebijakan Merdeka Belajar untuk mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: Keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat. Hal ini tergambar sebagai berikut:

Gambar 13 Kebijakan Merdeka Belajar



Pada gambar diatas dijelaskan arah kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud melalui:

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2. Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh kebijakan merdeka belajar akan terjadi pada kategori:

1. Ekosistem pendidikan;
2. Guru;
3. Pedagogi;
4. Kurikulum; dan
5. Sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbudristek akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

Secara garis besar Kebijakan Merdeka belajar terwujud melalui arah Kebijakan dan strategi Kemendikbudristekristek 2020-2024 sebagai berikut:

## 1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat;
- b. Wajib belajar 9 (sembilan) tahun tuntas dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meningkat; dan
- c. Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD Holistik Intergral, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
2. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
3. Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
4. Mempertimbangkan TK SD satu atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
5. Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD, kebijakan spm, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (*crowdfunding*); dan
6. Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Dalam strategi yang dijabarkan oleh Kemendikbudristekristek, Dinas Pendidikan memiliki komitmen untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD sesuai yang di canangkan oleh pemerintah pusat di poin 1 sampai 6. Strategi ini akan menjadi acuan bagi Dinas dalam

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

menyusun renstra dan program kerja untuk tahun 2023-2026. Maka di dalam renstra Dinas Pendidikan akan memuat tentang peningkatan angka partisipasi PAUD di DKI Jakarta.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

1. Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
2. Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
3. Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
4. Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
  - 1) Melanjutkan program indonesia pintar (pip) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
  - 2) Membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja indonesia di luar negeri;
  - 3) Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3t yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
  - 4) Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
  - 5) Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

Strategi yang dijabarkan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada poin 1 sampai 4 akan memiliki dampak bagi dinas pendidikan untuk memfokuskan pada pengelolaan pendidikan dari jenjang sd/mi, smp/mts, dan sma/smk/ma dengan menambah jumlah daya tampung sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah serta menambah sekolah inklusi untuk menampung siswa berkebutuhan khusus. Selain itu penyaluran bantuan pendidikan berupa kjp bagi peserta didik untuk menekan angka putus sekolah. Dana bos dan bop kepada sekolah swasta untuk mensejajarkan kualitas sekolah swasta dengan sekolah negeri.

2. Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan  
Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:
  - a. Kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) menguat;
  - b. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
  - c. Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- d. Mutu layanan paud satu tahun pra-sd meningkat;
- e. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
- f. Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
- g. Proses pembelajaran meningkat mutunya;
- h. Kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat;
- i. Jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
- j. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri.

Strategi yang dilakukan kemendikbudristek dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) di sekolah adalah:

1. Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
2. Mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru.

Dalam strategi yang dijabarkan oleh Kemendikbudristek pada poin 1 dan 2 akan memiliki dampak dimana renstra dan program kerja yang akan disusun oleh Dinas Pendidikan harus terdapat penguatan kapasitas kepemimpinan pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:

1. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
2. Mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
3. Melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
4. Berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
5. Bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;
6. Menerapkan berbagai inovasi termasuk *multi-subject teaching* untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
7. Membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Dari strategi Kemendikbudristekristek dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik dari poin 1 sampai 7 akan memiliki dampak pada renstra dan program kerja dimana Dinas Pendidikan akan melakukan fokus pada peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Pendidik yang akan dilaksanakan oleh UPT P2KPTK2 di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
2. Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
3. Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
4. Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
5. Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
6. Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah.

Dampak dari strategi percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan untuk renstra Dinas Pendidikan pada poin 1 akan mendorong penambahan gedung baru atau kelas baru khususnya untuk jenjang menengah terutama di wilayah yang memiliki APM cukup rendah. Pada poin 2 Dinas Pendidikan melalui program sekolah kolaborasi mendorong untuk terciptanya kerja sama antara sekolah swasta dan sekolah negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang memiliki mutu rendah. Pada poin 3 pengelolaan pendidikan di DKI Jakarta melalui dana BOS dan BOP untuk mendorong sekolah-sekolah yang memiliki mutu rendah untuk dapat meningkatkan kualitasnya. Pada poin 4 Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian RKAS dan penganggaran pendidikan. Pada poin 5 dan 6 Dinas Pendidikan akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan di DKI Jakarta.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:

1. Menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
2. Memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
3. Menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
4. Mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG.

Pada strategi yang disusun Kemendikbudristekristek dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD pada poin 1-4 akan memiliki dampak untuk Dinas Pendidikan dalam menyiapkan rencana strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan PAUD satu tahun pra-SD di DKI Jakarta. Sehingga dalam renstra 2023-2026 Dinas Pendidikan akan memfokuskan pada rencana pelayanan PAUD. Melalui seruan gubernur Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi massif tentang wajib PAUD 1 tahun sebelum SD.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:

1. Mengembangkan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
2. Mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.
3. Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
4. Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
5. Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
6. Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Pada poin 1 akan berdampak pada Renstra dan program kerja Dinas Pendidikan dalam menguatkan fungsi RKAS sebagai platform pengadaan barang dan jasa sekolah untuk mempermudah pekerjaan kepala sekolah dan guru.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1. Menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
2. Mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (*school excellence*) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (*formative assessment*), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;
3. Memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
4. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
5. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
6. Mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
7. Menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan

8. Mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Pada poin 1 Dinas Pendidikan diharuskan untuk menjaga dan meningkatkan standar nasional pendidikan. Pada poin 2 akan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih sederhana sesuai dengan strategi Kemendikbudristek. Pada poin 3 dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan harus memiliki rencana strategis dan program kerja dalam meningkatkan peran dan pola pikir kelembagaan baik dari tingkat Dinas, Sudin, dan UPT. Pada poin 4 Dinas Pendidikan melalui bidang persekolahan untuk bisa mendorong penilaian formatif pendidikan. Pada poin 5 Dinas melalui bidang PTK bekerja sama dengan UPT untuk bisa memberikan pelatihan kepada pendidik dan tenaga pendidik. Pada poin 6 Dinas melalui Bidang SMK dan UPT bisa bekerja sama dengan DU/DI untuk mendorong terciptanya ekosistem dan pelatihan berstandar industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

1. Mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (learning), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi;
2. Memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain;
3. Membina guru agar dapat menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan);
4. Mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;
5. Melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum;
6. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;
7. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
8. Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Pada poin 1 sampai 4 memiliki dampak bagi Dinas Pendidikan melalui Bidang PTK dan UPT mendorong dan membina guru mengikuti pelatihan dan sekolah penggerak yang sesuai dengan renstra Kemendikbudristek. Pada poin 5 memiliki dampak bagi Dinas Pendidikan melalui bidang persekolahan dan satuan pendidikan untuk memiliki program yang bisa membantu siswa yang memiliki kompetensi kurang. Pada poin 6 akan memiliki dampak bagi Dinas dimana bidang persekolahan dan satuan pendidikan didorong untuk bisa melakukan kerja sama dengan DU/DI dalam rangka penguatan dan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah adalah:

1. Mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM;
3. Mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif;
4. Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran; dan
5. Mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah.

Pada poin 1, 3 dan 5 akan berdampak pada Dinas Pendidikan memiliki program untuk bisa mendorong satuan pendidikan menerapkan penilaian formatif pendidikan dan penggunaan portofolio serta asesmen yang lebih otentik. Pada poin 2 dan 4 Dinas Pendidikan

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
2. Membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
3. Mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
4. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
6. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
7. Peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
8. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
9. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
10. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
11. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

12. Membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
13. Menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

Pada poin 1, 2, 5, 9, dan 10 Dinas Pendidikan melalui bidang SMK bekerja sama dengan DU/DI untuk mengembangkan kurikulum, praktik kerja industri/ project work, memberikan kesempatan praktisi/profesional untuk mengajar, sertifikasi Pendidik, dan sertifikasi lulusan SMK. Poin 3 Bidang SMK juga mengembangkan SMK Unggulan agar bisa menjadi percontontohan dan mengembangkan kolaborasi dengan sekolah yang memiliki mutu lebih rendah. Pada poin 7 Bidang PTK bisa melakukan pelatihan kepada Pendidik untuk bisa meningkatkan kualitas keilmuan dan pembelajaran di SMK. Pada poin 8 Bidang PTK meningkatkan kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan baik melalui rekrutmen dan pelatihan. Pada poin 12 Bidang SMK dan SMK bisa memberikan insentif kepada DU/DI yang berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan SMK.

### 3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- a. Kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
- b. Perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
- c. Kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1. Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
2. Mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
3. Mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
4. Menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
5. Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

Pada poin 1 dan 2 akan memiliki dampak bagi Dinas Pendidikan melalui Bidang persekolahan untuk mengembangkan kurikulum yang mendukung peningkatan literasi dan numerasi siswa. Pada poin 3 Bidang PTK melakukan pelatihan pada pendidik untuk mengembangkan pengajaran yang berfokus pada literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI). Pada poin 4 Bidang persekolahan menyiapkan modul pelatihan dan sumber bacaan. Pada poin 5 Dinas pendidikan menyediakan anggaran untuk penguatan dan dukungan kepada pendidik yang mengajarkan literasi dan numerasi di jenjang SD.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. Memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
2. Memfasilitasi *exchange of information* dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
  3. Melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
  4. Mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
  5. Mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
  6. Menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
  7. Mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
  8. Memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
  9. Meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
  10. Mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
  11. Memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
  12. Mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
  13. Mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (*bengkel, lab*) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
  14. Melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Pada poin 1 memiliki dampak bagi Dinas Pendidikan dimana Bidang SMK, dan SMK bisa melibatkan DU/DI dalam mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Pada poin 2 Bidang SMK membuat platform guna membuka komunikasi untuk pertukaran informasi dengan DU/DI agar pelatihan dan pendidikan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bagi peserta didik.

Pada poin 3 Bidang SMK bisa melakukan tracing untuk mendata lulusan SMK dan menganalisisnya apakah pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Pada poin 4 dan 9 Bidang SMK mengembangkan kurikulum disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja. Pada poin 5 bidang SMK

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai kebutuhan DU/DI. Pada poin 6 Bidang SMK memiliki program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI. Pada poin 7 Bidang SMK dan SMK memiliki program untuk mendatangkan pengajar atau praktisi dari DU/DI.

Pada poin 8 Bidang SMK dan PTK menempatkan pendidik untuk pelatihan langsung di Industri. Pada poin ke 10 dan 11 SMK memiliki otonomi untuk mengembangkan fleksibilitas pendidikan. Pada poin 12 Dinas Pendidikan bekerja sama dengan media untuk meningkatkan citra SMK di Jakarta. Pada poin 13 Dinas Pendidikan membuka kerja sama dengan Pendidikan Tinggi untuk bekerja sama dengan SMK. Bidang SMK dan SMK bisa melakukan *joint research* atau *project work* dengan DU/DI.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. Memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. Selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
3. Mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
4. Memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
5. Menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
6. Memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
7. Memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
8. Menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
9. Memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
10. Menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pada poin 1 memiliki dampak bagi Dinas Pendidikan yaitu bidang SMK dan SMK memberikan kesempatan kepada DU/DI untuk melakukan sertifikasi kepada peserta didik. Pada poin 2, 3 dan 4 Bidang SMK dan SMK memastikan pengembangan *soft skills*, budaya kerja, kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, selain itu SMK mendorong dan memfasilitasi *project work* dan/ riset terapan. Pada poin 5 Bidang SMK melakukan penataan asesmen kompetensi peserta didik. Pada poin 6 Bidang PTK memperlengkapi pendidik dan tenaga pendidik dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Pada poin 7 Bidang Prasardik menyiapkan sarana dan prasarana untuk pendidikan SMK yang dikembangkan bersama DU/DI. Poin 8 Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan K/L untuk menggerakkan dukungan DU/DI kepada SMK. Pada poin 9 Bidang SMK dan SMK memiliki platform untuk penyampaian informasi kepada peserta didik tentang dunia kerja. Pada poin 10 Bidang SMK harus menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan rekognisi pembelajaran lampau dalam pendidikan dan pelatihan di SMK.

#### 4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:

- a. Nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
- b. Peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
- c. Cagar budaya terkelola dengan baik;
- d. Kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
- e. Sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

1. Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
  - a. Memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
  - b. Menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
  - c. Mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
  - d. Menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
  - e. Menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
  - f. Menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
2. Memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
3. Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (*children wellbeing*).

Dari strategi yang dijelaskan di atas, pada poin 1 memiliki dampak bagi Dinas Pendidikan yaitu melalui Bidang persekolahan menyiapkan kurikulum yang membangun identitas dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Pada poin Bidang persekolahan menyiapkan survei keadaan sekolah. Pada poin 3 Bidang persekolahan melakukan pengumpulan informasi tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

1. Melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
2. Melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
3. Melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
4. Mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
5. Memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
6. Melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan
7. Membantu pengembangan muatan lokal - terutama bahasa daerah - dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal.

Pada poin 1 dan 7 memiliki dampak Bidang persekolahan mengembangkan kurikulum yang memiliki muatan lokal. Pada poin 2 semua satuan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing. Pada poin 3 Bidang persekolahan mengembangkan kurikulum yang memiliki konten-konten sejarah Indonesia. Pada poin 4 satuan pendidikan melakukan kegiatan pertukaran budaya. Pada poin 5 dan 6 satuan pendidikan memberikan ruang bagi orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan budaya di lingkungan satuan pendidikan.

### 5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- a. Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
- b. Efisiensi satuan pendidikan meningkat;
- c. Akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan
- d. Perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
2. Mengembangkan mekanisme dengan kemenpanrb, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain:
  - a. Formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru; dan
  - b. Pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (*cashless*).
3. Mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Pada poin 1 akan berdampak pada Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk pendataan penerima KJP Plus. Pada poin 3 Bidang SMK mengundang partisipasi DU/DI dalam penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi, penyesuaian kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi. Hal ini berdampak pada Dinas Pendidikan menyusun kebijakan untuk mempermudah urusan administrasi di satuan pendidikan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

1. Membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
2. Memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyesuaikan kebijakan; dan
3. Membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota.

Pada poin 1,2, dan 3 akan memiliki dampak dimana Dinas Pendidikan melalui Bidang Perencanaan dan Penganggaran berkonsultasi dan berkoordinasi dengan K/L terkait penyusunan RPD, Renstra, Program Kegiatan, dan penganggaran.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2023-2026 telah melakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2020-2024 agar arah perencanaan pembangunan pendidikan di DKI Jakarta selaras dengan arah pembangunan nasional. Adapun hasil telaahan Renstra Kemendikbudristek dengan kondisi pendidikan di DKI Jakarta digambarkan pada tabel dibawah ini.

*Tabel 26 Analisis Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek*

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang</b>			
a	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun sebesar 53,10%	Masih kurangnya jumlah PAUD Negeri dengan kebutuhan daya tampung peserta didik	Masih rendah nya kesadaran masyarakat dan belum adanya pemetaan kebutuhan pendidik	Besarnya anggaran pendidikan untuk menambag jumlah rombongan
b	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat sebesar 100%	Sudah Mencapai 100%	Tidak ada	Tersedianya SD di setiap kelurahan dan besarnya

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				anggaran bantuan personal pendidikan
c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat sebesar 100%	Sudah mencapai 100%	Tidak ada	Besarnya anggaran bantuan perseonal pendidikan
d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat sebesar 95%	Sudah mencapai 100%	Tidak ada	Besarnya anggaran bantuan personal pendidikan
e	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi sebesar 37,63%	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang</b>			
a	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) sebesar 4	Masih kurangnya Pendidik profesional di lingkungan PAUD	Belum semua PAUD menerapkan holistik integral	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung PAUD holistik integral
b	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 61,2%	Masih kurangnya Pendidik yang mengerti tentang pengembangan kompetensi literasi siswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kebiasaan Membaca bagi para Pendidik</li> <li>2. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi</li> <li>3. Sarana Membaca yang Minim</li> <li>4. Kurangnya motivasi untuk membaca</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penghargaan terhadap pendidik dan peserta didik yang gemar membaca</li> <li>2. Adanya juknis/panduan pelaksanaan Gerakan Literasi untuk Pendidik</li> <li>3. Diadakan lomba/ kompetisi Literasi</li> </ol>
c	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 30,1%	Masih kurangnya Pendidik yang mengerti tentang pengembangan kompetensi literasi siswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pelatihan guru tentang literasi numerasi</li> <li>2. belum terbentuknya tim literasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intensitas pemanfaatan dan penerapan numerasi dalam pembelajaran</li> </ol>

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			numerasi di sekolah	2. Meningkatkan jumlah pelatihan guru matematika 3. Diadakan lomba/ kompetisi numerasi
d	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca sebesar 396	PISA 2018 DKI Jakarta berada pada skor 410	Belum meratanya kualitas mutu pendidikan khususnya satuan pendidikan swasta	Meratanya kualitas mutu pendidikan di sekolah negeri.
e	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika 388	PISA 2018 DKI Jakarta berada pada 416	Belum meratanya kualitas mutu pendidikan khususnya satuan pendidikan swasta	Meratanya kualitas mutu pendidikan di sekolah negeri.
f	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains sebesar 402	PISA 2018 DKI Jakarta berada pada skor 424	Belum meratanya kualitas mutu pendidikan khususnya satuan pendidikan swasta	Meratanya kualitas mutu pendidikan di sekolah negeri.
g	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebesar 52,60%	Masih tidak terdapatnya link and match antara kurikulum SMK dengan DU/DI	Kualitas kepemimpinan kepala sekolah belum merata	Banyaknya perusahaan yang bisa dilibatkan untuk mengembangkan SMK
h	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
i	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sebesar 51%	Belum semua kandidat dapat diploting ke LPTK karena hanya menggunakan biaya APBN	Minimnya kapasitas penyelenggara PPG	1. Adanya regulasi dan mekanisme terintegrasi antara pendidikan profesi dan perekrutan guru 2. Sharing anggaran

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				(menggunakan APBD) 3. Pelaksanaan PPG full online
j	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri sebesar 40%	Belum maksimalnya program magang bagi guru	Terbatasnya jumlah guru yang bisa mengikuti kegiatan magang di satuan pendidikan	Banyaknya jumlah DUDI yang bisa berkolaborasi untuk program magang guru
k	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri sebesar 80%	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
<b>3</b>	<b>Menguatnya karakter peserta didik</b>			
a	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter sebesar 50%	Belum semua Kepala Sekolah memahami pengembangan sekolah berkarakter	Belum semua sekolah swasta memahami kurikulum merdeka belajar dan profil pelajar pancasila	Satuan Pendidikan Negeri memiliki lingkungan kondusif untuk pembangunan karakter
b	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila sebesar 40%	Belum semua pendidik dan tenaga pendidik mengikuti program Guru Penggerak	Belum semua guru memiliki kesadaran untuk mengikuti program sekolah penggerak	Besarnya jumlah pendidik profesional bergelar S1 di DKI Jakarta
c	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar sebesar 40%	Belum semua pendidik dan tenaga pendidik mengikuti program Guru Penggerak	Belum semua sekolah swasta memahami kurikulum merdeka belajar dan profil pelajar pancasila	Besarnya jumlah pendidik profesional bergelar S1 di DKI Jakarta
<b>4</b>	<b>Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan</b>			
a	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia sebesar 530	Belum masifnya sosialisasi UKBI di sekolah	Belum mengetahuinya pendidik tentang UKBI di sekolah	Besarnya angka guru profesional di DKI Jakarta
b	Jumlah penutur muda bahasa daerah sebanyak 98.000 orang	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
c	Indeks Pembangunan Kebudayaan	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Sasaran Jangka Menengah Kemendikbudristek	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel			
a	Opini laporan keuangan Kemendikbudristek	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
b	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
c	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		
D	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	tidak relevan dan tidak menjadi kewenangan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

### 3.3 Analisis Dampak Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 berfungsi sebagai dokumen yang dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan kota Jakarta sesuai dengan dinamika perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Telaahan RTRW ditujukan untuk dapat mengidentifikasi implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan. Dengan memperhatikan struktur dan pola ruang yang ada saat ini, Dinas Pendidikan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam masa 4 (empat) tahun mendatang. Dalam pembangunan sekolah baru atau kelas baru harus memperhatikan Pola Sifat Lingkungan (PSL) yaitu sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat. Pada wilayah yang dipetakan rawan bencana, Dinas Pendidikan mengembangkan bangunan yang tahan terhadap bencana. Pada wilayah kepulauan seribu yang memiliki kondisi pulau-pulau terpisah akan di fokuskan untuk pembangunan boarding school. Dinas Pendidikan akan menetapkan Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP) untuk memetakan kebutuhan sekolah sampai pada jenjang kelurahan. Pada tabel 27 terdapat sebaran sekolah negeri di setiap kelurahan dan rencana pola ruang di setiap kecamatan yang akan menjadi bahan awal kajian ZLSP.

Tabel 27 Jumlah Satuan Pendidikan Per Kelurahan

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier kawasan perkantoran, kawasan perdagangan skala kota dan penyediaan prasarana pengembangan Kawasan Grosir Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	9	2	1	3	1
				Cempaka Putih Timur	6	3	2	1	
				Rawasari	6	2	1	1	0
		Gambir	penataan kawasan perkantoran, pemerintahan nasional, dan penyediaan prasarana pendukung Kawasan Medan Merdeka;	Cideng	7	1	0	0	0
				Duri Pulo	9	2	1	1	0
				Gambir	1	1	1	1	0
				Kebon Kelapa	3	1	1	0	0
				Petojo Selatan	3	1	0	1	0
		Petojo Utara	10	8	5	5	0		
		Johar Baru	penataan kawasan campuran dilengkapi prasarana yang	Galur	3	0	0	0	0
				Johar Baru	20	7	2	2	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terintegrasi dengan angkutan massal	Kampung Rawa	2	0	0	0	0
				Tanah Tinggi	11	2	0	0	0
		Kemayoran	pengembangan dan penataan kawasan perkantoran, pusat eksibisi dan informasi bisnis multifungsi berintensitas tinggi dengan skala pelayanan nasional dan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Bandar Kemayoran	Cempaka Baru	8	4	1	2	0
				Gunung Sahari Selatan	10	7	4	6	1
				Harapan Mulya	5	3	0	1	0
				Kebon Kosong	10	2	1	1	2
				Kemayoran	10	1	1	1	0
				Serdang	8	1	1	1	0
				Sumur Batu	9	3	2	1	0
				Utan Panjang	6	1	1	0	0
		Menteng		Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan kawasan perwakilan negara dan/atau lembaga asing disertai penyediaan prasarana	Cikini	3	3	0	1
			Gondangdia		6	3	3	1	0
			Kebon Sirih		1	2	1	0	0
			Menteng		7	3	2	3	0
			Pegangsaan		5	1	1	1	0
		Sawah Besar	pengembangan dan penataan pusat perdagangan skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua	Gunung Sahari Utara	9	2	3	1	0
				Karang Anyar	9	3	0	0	0
				Kartini	2	1	0	1	0
				Mangga Dua Selatan	5	1	2	0	0
				Pasar Baru	11	5	5	3	0
		Senen	penataan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Senen	Bungur	3	2	1	0	0
				Kenari	6	2	2	1	0
				Kramat	11	3	3	0	0
				Kwitang	2	0	0	0	0
				Paseban	11	3	1	2	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tanah Abang	penataan pusat perdagangan tekstil berintensitas tinggi dengan skala pelayanan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Sentra Primer Tanah Abang	Senen	1	1	1	4	0
				Bendungan Hilir	6	2	1	3	0
				Gelora	0	0	1	0	0
				Kampung Bali	4	2	1	0	0
				Karet Tengsin	3	2	2	1	1
				Kebon Kacang	3	2	1	2	0
				Kebon Melati	3	3	0	2	0
				Petamburan	8	4	1	1	0
2	Jakarta Utara	Cilincing	pembangunan dan penataan kawasan industri dan pergudangan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional pada Kawasan Strategis Marunda	Cilincing	14	6	1	2	1
				Kalibaru	11	6	0	2	0
				Marunda	9	3	0	6	1
				Rorotan	8	2	1	3	0
				Semper Barat	18	7	5	2	0
				Semper Timur	16	8	2	3	0
				Sukapura	10	5	3	0	0
		Kepala Gading	pengembangan dan penataan kawasan perkantoran skala nasional, dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala daerah pada Kawasan Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	14	10	9	4	0
				Kelapa Gading Timur	9	8	3	1	0
				Pegangsaan Dua	18	9	9	3	1
		Koja	penataan kawasan perdagangan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Koja	Koja	5	0	1	0	0
				Lagoa	12	11	2	8	0
				Rawa Badak Selatan	11	2	1	0	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rawa Badak Utara	14	5	1	1	0
				Tugu Selatan	3	4	1	1	1
				Tugu Utara	17	7	2	5	1
		Pademangan	pengembangan pusat perdagangan skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua	Ancol	4	2	2	0	0
				Pademangan Barat	11	4	1	2	1
				Pademangan Timur	9	7	1	3	0
		Penjaringan	pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Pluit	Kamal Muara	1	1	1	0	0
				Kapuk Muara	7	6	6	1	0
				Pejagalan	15	12	10	2	0
				Penjaringan	12	6	3	3	0
		Tanjung Priok	pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran skala internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Sunter	Pluit	15	15	7	2	0
				Kebon Bawang	11	6	3	8	2
				Papanggo	7	6	2	3	0
				Sungai Bambu	11	7	1	4	0
				Sunter Agung	20	13	8	2	1
				Sunter Jaya	10	4	2	2	0
				Tanjung Priok	12	4	1	2	0
Warakas	12	4	1	1	0				
3	Jakarta Barat	Cengkareng	kawasan pusat perdagangan dan jasa pada Kawasan Pasar Cengkareng	Cengkareng Barat	28	15	8	6	2
				Cengkareng Timur	27	12	6	11	0
				Duri Kosambi	15	8	4	1	0
				Kapuk	30	14	2	4	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kedaung Kali Angke	13	1	0	1	0
				Rawa Buaya	17	12	2	2	0
		Grogol Petamburan	pusat kegiatan sekunder stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi konsep TOD pada Kawasan Grogol	Grogol	8	6	3	5	0
				Jelambar Baru	10	3	2	0	0
				Jelambar	10	8	3	2	1
				Tanjung Duren Selatan	2	1	0	0	0
				Tanjung Duren Utara	7	6	4	3	0
				Tomang	7	3	2	2	0
				Wijaya Kusuma	9	5	4	3	0
		Taman Sari	pengembangan pusat kegiatan sekunder dan kawasan pusat perdagangan grosir dan eceran pada kawasan Glodok	Glodok	3	3	1	0	0
				Keagungan	8	1	1	0	0
				Krukut	3	2	1	3	0
				Mangga Besar	7	1	1	1	0
				Maphar	1	0	0	0	1
				Pinangsia	5	2	0	1	0
				Taman Sari	9	1	1	2	0
				Tangki	5	3	1	2	0
		Tambora	kawasan campuran yang didukung prasarana kota	Angke	11	2	1	2	0
				Duri Selatan	3	2	1	1	2
				Duri Utara	11	4	1	2	0
				Jembatan Besi	7	2	1	1	0
				Jembatan Lima	8	3	0	0	0
				Kali Anyar	5	3	0	1	0
				Krendang	1	2	1	1	0
				Pekojan	7	4	0	1	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Roa Malaka	1	0	0	0	0
				Tambora	4	2	3	0	0
				Tanah Sereal	8	1	0	1	0
		Kebon Jeruk	pengembangan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa	Duri Kepa	14	11	5	3	0
				Kebon Jeruk	14	5	4	3	5
				Kedoya Selatan	5	5	3	6	0
				Kedoya Utara	8	6	4	0	1
				Kelapa Dua	4	2	0	1	0
				Sukabumi Selatan	11	3	0	2	0
				Sukabumi Utara	12	3	0	1	1
		Kalideres	pengembangan dan penataan pusat kawasan industri serta peningkatan terminal dan stasiun terpadu	Kalideres	22	13	7	6	1
				Kamal	13	9	1	4	0
				Pegadungan	33	18	10	6	1
				Semanan	19	9	3	3	0
				Tegal Alur	28	13	4	4	2
		Palmerah	pengembangan pusat kegiatan tersier dan pusat perdagangan tanaman hias untuk melayani kegiatan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Rawa Belong	Jatipulo	9	2	0	1	0
				Kemanggisan	11	3	2	1	1
				Kota Bambu Selatan	3	0	0	0	0
				Kota Bambu Utara	5	3	1	1	0
				Palmerah	17	4	2	2	0
				Slipi	7	1	1	5	1
		Kembangan	pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf	Joglo	15	9	4	2	0
				Kembangan Selatan	5	6	4	1	1

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			internasional, dan penyediaan prasarana pada Kawasan Sentra Primer Barat	Kembangan Utara	12	2	1	3	0
				Meruya Selatan	7	3	1	0	1
				Meruya Utara	18	9	5	3	0
				Srengseng	12	4	3	2	0
4	Jakarta Selatan	Cilandak	pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal	Cilandak Barat	16	7	7	5	1
				Cipete Selatan	6	5	1	0	1
				Gandaria Selatan	4	1	1	0	0
				Lebak Bulus	11	5	4	4	3
				Pondok Labu	17	12	5	5	0
		Jagakarsa	pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal	Ciganjur	6	3	1	2	0
				Cipedak	10	5	0	5	0
				Jagakarsa	21	10	6	3	1
				Lenteng Agung	11	6	1	3	1
				Srengseng Sawah	14	9	4	11	2
				Tanjung Barat	11	5	1	4	0
		Kebayoran Baru	pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kawasan Kebayoran Baru	Cipete Utara	10	1	1	1	1
				Gandaria Utara	6	3	3	2	1
				Gunung	2	3	1	2	1
				Kramat Pela	6	3	4	0	0
				Melawai	2	6	4	4	0
				Petogogan	2	1	1	2	0
				Pulo	6	1	2	1	0
				Rawa Barat	3	0	0	0	0
				Selong	2	1	3	1	0
			Senayan	0	0	0	0	0	

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebayoran Lama	pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan perdagangan tradisional pada Kawasan Kebayoran Lama	Cipulir	7	3	2	3	0
				Grogol Selatan	9	3	2	2	0
				Grogol Utara	13	4	1	1	1
				Kebayoran Lama Selatan	11	4	2	6	0
				Kebayoran Lama Utara	7	6	3	3	1
				Pondok Pinang	9	7	4	6	0
		Mampang Prapatan	pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana terutama perumahan padat dan rawan banjir	Bangka	9	2	2	1	0
				Kuningan Barat	3	0	0	0	0
				Mampang Prapatan	4	2	1	1	0
				Pela Mampang	16	7	1	1	0
		Pancoran	pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan di kawasan permukiman padat dan rawan banjir	Tegal Parang	4	3	1	2	0
				Cikoko	2	1	0	0	0
				Duren Tiga	9	2	2	2	1
				Kalibata	6	2	1	1	0
				Pancoran	4	0	1	2	0
		Pasar Minggu	pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana terutama di zona perumahan padat dan rawan banjir	Pengadegan	4	1	0	0	0
				Rawajati	8	1	0	0	0
				Cilandak Timur	9	5	1	3	0
				Jati Padang	4	4	2	2	1
				Kebagusan	9	2	0	1	0
				Pasar Minggu	12	4	3	4	1
				Pejaten Barat	7	5	1	2	0
		Pejaten Timur	11	3	1	1	0		
			Ragunan	10	3	2	2	2	

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pesanggrahan	pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan pusat perdagangan pada Kawasan Cipulir	Bintaro	13	2	2	0	3
				Pesanggrahan	10	4	2	2	0
				Petukangan Selatan	8	4	1	3	1
				Petukangan Utara	11	6	1	6	0
				Ulujami	7	2	2	1	1
		Setiabudi	kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan massal pada Kawasan Segitiga Emas Setiabudi	Guntur	3	1	0	0	0
				Karet Kuningan	3	1	0	2	0
				Karet Semanggi	0	0	0	0	0
				Karet	3	1	0	0	0
				Kuningan Timur	3	4	1	0	0
				Menteng Atas	8	3	2	0	1
				Pasar Manggis	4	3	0	2	0
		Setiabudi	4	1	1	1	0		
		Tebet	kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan massal pada Kawasan Manggarai	Bukit Duri	7	1	2	2	0
				Kebon Baru	5	2	2	0	0
				Manggarai Selatan	3	1	0	0	0
				Manggarai	4	3	1	2	0
				Menteng Dalam	8	5	2	2	1
Tebet Barat	9			2	3	2	1		
Tebet Timur	6			4	1	1	1		
5	Jakarta Timur	Cakung	pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf internasional dan penyediaan	Cakung Barat	12	4	2	4	0
				Cakung Timur	12	6	4	4	0
				Jatinegara	13	6	2	4	0
				Penggilingan	12	7	1	6	1
				Pulo Gebang	22	10	4	7	1

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			prasarana pada Kawasan Sentra Primer Timur	Rawa Terate	3	1	0	1	0
				Ujung Menteng	9	6	2	9	0
		Cipayung	pengembangan dan penataan kawasan permukiman	Bambu Apus	4	5	2	4	1
				Ceger	3	2	0	0	0
				Cilangkap	5	0	1	3	1
				Cipayung	10	4	4	5	0
				Lubang Buaya	14	10	2	7	0
				Munjul	3	2	1	2	1
				Pondok Ranggon	5	4	0	0	0
				Setu	2	1	2	0	0
		Ciracas	pengembangan dan penataan industri dan pergudangan	Cibubur	12	4	1	4	0
				Ciracas	15	5	3	5	0
				Kelapa Dua Wetan	6	5	6	2	0
				Rambutan	6	5	2	6	0
				Susukan	10	1	1	1	0
		Duren Sawit	pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan kawasan industri	Duren Sawit	21	7	3	4	1
				Klender	16	4	3	4	0
				Malaka Jaya	12	2	1	3	2
				Malaka Sari	7	2	2	1	0
				Pondok Bambu	19	10	6	3	2
				Pondok Kelapa	19	8	3	7	0
				Pondok Kopi	12	7	4	8	1
		Jatinegara	pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran	Bali Mester	6	4	3	2	0
				Bidara Cina	8	2	0	1	0
				Cipinang Besar Selatan	18	2	2	4	2

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cipinang Besar Utara	14	3	0	2	0
				Cipinang Cempedak	10	5	2	3	0
				Cipinang Muara	17	5	1	3	0
				Kampung Melayu	6	3	0	0	0
				Rawa Bunga	3	4	2	0	0
		Kramat Jati	pengembangan dan penataan pusat kegiatan tersier pada kawasan perdagangan dan Pusat Grosir cililitan	Balekambang	4	2	2	3	1
				Batu Ampar	15	4	2	3	1
				Cawang	8	4	1	2	0
				Cililitan	7	1	2	2	0
				Dukuh	5	3	1	2	1
				Kramat Jati	11	7	2	3	1
		Makasar	pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melalui pengembangan hutan kota	Kampung Tengah	8	2	1	3	0
				Cipinang Melayu	13	4	2	3	1
				Halim Perdana Kusuma	9	4	4	1	2
				Kebon Pala	14	3	1	4	0
				Makasar	10	2	0	2	0
		Matraman	pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dengan menyediakan prasarana yang	Pinang Ranti	7	2	2	1	0
				Kayu Manis	5	4	1	3	0
				Kebon Manggis	7	2	1	2	0
				Pal Meriam	6	0	1	1	0
				Pisangan Baru	7	1	0	2	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terintegrasi dengan angkutan umum massal	Utun Kayu Selatan	20	4	3	1	0
				Utun Kayu Utara	8	3	0	3	0
		Pasar Rebo	pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum	Baru	7	1	2	0	0
				Cijantung	11	7	4	9	2
				Gedong	8	3	2	3	0
				Kalisari	8	4	1	2	0
				Pekayon	12	4	2	4	0
		Pulo Gadung	pengembangan dan penataan sebagai kawasan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan Pasar Pulo Gadung	Cipinang	8	1	0	2	0
				Jati	9	5	3	3	0
				Jatinegara Kaum	8	3	0	1	0
				Kayu Putih	12	7	4	2	0
				Pisangan Timur	9	5	1	2	2
				Pulo Gadung	5	1	2	2	0
				Rawamangun	15	10	4	5	1
6	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan internasional	Pulau Harapan	2	2	0	0	
				Pulau Kelapa	2	0	0	0	
				Pulau Panggang	3	1	1	0	0
		Kepulauan Seribu Selatan	pengembangan dan penataan kawasan sebagai tujuan wisata	Pulau Pari	2	2	0	0	0
				Pulau Tidung	4	1	0	1	0

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Rencana Pola Ruang Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SD/MI	Jumlah SMP/MTs	Jumlah SMA/MA	Jumlah SMK	Jumlah SLB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar lokal, nasional, dan internasional	Pulau Untung Jawa	1	1	0	0	0

Pada hasil tabel di atas menunjukkan beberapa kecamatan yang masih kekurangan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah. Daerah pemukiman yang padat penduduk perlu kebijakan untuk menambah kapasitas daya tampung jenjang SMA atau SMK. Butuh pemetaan dan kajian lebih mendalam untuk memetakan lebih lanjut tentang lokasi pemenuhan layanan satuan pendidikan yang menjadi prioritas. Pemetaan dan kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menetapkan Zona Layanan Satuan Pendidikan DKI Jakarta.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## 3.4 Target Sustainable Development Goals (SDGs)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi SDGs dalam Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini membuktikan komitmen Jakarta berkomitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan bersama negara-negara dan kota-kota lain didunia. Salah satu yang menjadi tujuan SDGs adalah Pendidikan Berkualitas. Dalam tujuan tersebut terdapat 10 (sepuluh) target SDGs di bidang Pendidikan antara lain:

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
7. Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.
8. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
9. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
10. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Pada target di poin 1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu dalam rangka perluasan akses pendidikan, terdapat program KJP Plus dan KJMU kepada anak-anak dari keluarga miskin. Penambahan jumlah gedung dan pembukaan sekolah baru juga menjadi agenda prioritas di dalam renstra Dinas Pendidikan. Pada poin 2 Dinas Pendidikan juga memiliki agenda prioritas untuk

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

pengelolaan PAUD, selain itu hal ini karena masih rendahnya angka partisipasi kasar jenjang PAUD sebesar 20,53.

Pada poin 3 partisipasi pendidikan di jenjang menengah khususnya SMA/SMK, dan MA sudah menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas Pendidikan. Masih rendahnya angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK, dan MA yang hanya sebesar 80,97. menjadi refleksi bahwa DKI Jakarta membutuhkan pembukaan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan partisipasi di jenjang SMA/SMK, dan MA. Pada poin 4 pengembangan sekolah kejuruan juga telah di kerjakan oleh Dinas Pendidikan dan masih akan tetap berlanjut menjadi agenda prioritas pada Renstra 2023-2026, hal ini agar lulusan SMK bisa terserap di DU/DI. Pada poin 5 Dinas Pendidikan membuka bagi semua gender untuk mengikuti pendidikan di semua jenjang. Selain itu bagi disabilitas juga ditetapkan sekolah inklusif agar semua bisa mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.

Pada poin 6 Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian kurikulum dan peningkatan kompetensi Pendidik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dan akan dilakukan asesmen nasional sesuai kebijakan dari Kemendikbudristek dalam untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat guna memperbaiki kualitas belajar-mengajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar murid. Pada poin 8 Dinas Pendidikan telah membuka sekolah inklusif untuk memberikan pelayanan dan membuka akses pendidikan bagi disabilitas. Sekolah inklusif tersebut ditargetkan bisa diterapkan di sekolah negeri pada semua jenjang. Pada poin 10 Dinas Pendidikan melalui P2KPTK telah memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi pendidik.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pendidikan telah merumuskan 4 poin besar yang menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di DKI Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya DKI Jakarta pada tahun 2024 statusnya tidak lagi sebagai ibukota Negara, transformasi yang dilakukan adalah DKI Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis berskala global. Oleh karena itu Dinas Pendidikan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mewujudkan ide tersebut. Adapun keempat isu strategis yaitu:

1. Perluasan dan Pemerataan akses pendidikan: Masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang, PAUD, menengah dan khusus
2. Masih rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik pada asesmen nasional
3. Belum semua Pendidik dan Tenaga Pendidik dikategorikan sebagai Pendidik dan Tendik Profesional
4. Masih rendahnya penyerapan lulusan SMK baik di DU/DI, berwirausaha, dan yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.
5. Masih terdapat anak-anak yang memiliki gizi buruk di DKI Jakarta
6. Cukup tingginya anak-anak yang mengalami kondisi depresi

Pada dasarnya kondisi pendidikan di DKI Jakarta sudah cukup baik namun di beberapa jenjang pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Pada jenjang pendidikan PAUD di DKI Jakarta masih cukup rendah, padahal pendidikan PAUD memiliki peranan yang penting bagi perkembangan tumbuh kembang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif pada perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa, dan moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik pada masa mendatang. Untuk itu Dinas Pendidikan memberikan perhatian khusus pada angka partisipasi jenjang PAUD, karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses ke PAUD.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Pada jenjang pendidikan menengah khususnya SMA/SMKA dan MA angka partisipasi murni pada tahun 2021 masih cukup rendah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena banyak anak lulusan SMP/MTs yang tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK, dan MA. Pemerintah sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun sehingga memiliki konsekuensi untuk menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menyediakan pelayanan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK dan MA. Pendidikan SMK juga mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta akan berubah menjadi pusat ekonomi global. Oleh karena itu lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja DU/DI. Sehingga lulusan SMK banyak yang terserap di DU/DI sepenuhnya.

Pada jenjang pendidikan khusus masih terdapat anak-anak disabilitas yang tidak dapat mengakses pendidikan, khususnya yang berasal dari kurang mampu. Untuk sekolah-sekolah negeri masih terdapat kekurangan guru pendamping khusus dan pelatihan guru inklusi. Selain jumlah SLB negeri juga masih belum memenuhi untuk menampung anak-anak disabilitas sehingga pembukaan sekolah baru atau ruang kelas baru menjadi isu yang prioritas bagi dinas pendidikan.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. Pendidik dan tenaga pendidik harus bisa membaca perubahan zaman yang terjadi sehingga dalam proses pembelajaran dapat menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi bidang ilmu, kompetensi kognitif, kompetensi intrapersonal, dan kompetensi interpersonal. Selain itu tantangan bagi Pendidik saat ini dunia tengah berada pada kondisi yang diistilahkan sebagai VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). Kondisi ini adalah dimana dunia bisnis dan sosial penuh perubahan yang sangat cepat, tidak stabil serta tidak terduga, ketidakpastian informasi karena banyaknya informasi diberbagai platform baik media sosial ataupun media konvensional, dan kompleksitasnya permasalahan karena sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Untuk itu penting bagi pendidik untuk dapat membaca situasi saat ini agar peserta didik yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dunia saat ini.

Berangkat dari sejumlah yang dilakukan oleh sejumlah lembaga nasional maupun internasional, indeks literasi numerasi peserta didik kita masih berada di peringkat yang rendah di dunia. Peringkat literasi yang masih rendah juga berimbas kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolak ukur kualitas sumberdaya manusia (SDM) di sebuah negara. Ditilik dari skor IPM, Indonesia jug masih menempati level yang tidak menggembirakan terlebih jika dibandingkan dengan peringkat sejumlah negara jiran di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berangkat dari data dan fakta yang ada, penguatan kecakapan literasi dasar merupakan keniscayaan dan menjadi sesuatu yang tak dapat ditawar. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum pada tahun 2015 menegaskan bahwa penguasaan enam literasi dasar yaitu literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya kewargaan menjadi salah satu kompetensi abad-21 yang diperlukan oleh semua warga dunia terutama peserta didik.

Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas selain pendidikan, juga dibutuhkan kesehatan yang baik. Data yang dikeluarkan oleh Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting di Jakarta sebesar 16,8%. Perlu dilakukan peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak, untuk itu dinas pendidikan membuat program PMT-AS pada jenjang PAUD dan SD.

Isu kesehatan mental menjadi perhatian serius karena DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang punya berbagai macam latar belakang dan situasi lingkungan yang beragam, yang memiliki konsekuensi variasinya masalah yang dihadapi. Hal ini tentu berpengaruh bagi kesehatan mental manusianya. Anak-anak juga tidak terlepas dari kondisi kesehatan mental yang beragam. Pengaruh dimana ia dibesarkan dan kondisi apa yang dialami memberi dampak bagi tumbuh kembang

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

kepribadiannya. Untuk itu dinas pendidikan perlu melakukan skrining di setiap jenjang pendidikan, agar sekolah mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental peserta didik sehingga berpengaruh terhadap bagaimana pendidik dan tenaga pendidik melakukan proses pembelajaran.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan

#### 4.1.1 Visi

Adapun Visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan Berkualitas Untuk Semua”

#### 4.1.2 Misi

Misi disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
3. Mewujudkan efektifitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan.
6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan

### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pendidikan

Tujuan utama pembangunan pendidikan di provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tendik di setiap sekolah di Jakarta.
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan.
4. Terwujudnya ekosistem sekolah yang mendukung proses pembelajaran dan pembinaan siswa berkarakter mulia, mandiri, cerdas, kesehatan mental yang terjaga dan peduli lingkungan.
5. Menjadikan setiap guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P2KPTK2 minimal dua kali setahun secara rutin bagi setiap guru dan para tendik di seluruh sekolah di Jakarta.
6. Menguatkan peran dan tanggung jawab P2KPTK2 sebagai ‘pabrik’ guru dan tendik berkualitas dan profesional bagi semua guru dan tendik di seluruh Jakarta dan Pulau Seribu, sehingga mereka mampu menjadi the real educator, motivator, dan inspirator yang berkualitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan murid yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di sekolah.
7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan.
8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar.
9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah
10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di Pulau Seribu;
11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional.
13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar sekolah.
14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
15. Meningkatnya peran dan fungsi Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGK);
16. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
17. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para guru dan tendik berkinerja dan berdedikasi tinggi.
18. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel.
19. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
20. Berjalannya sistem e-catalogue yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan DKI.
21. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
22. Terwujudnya pola kepemimpinan sekolah yang visioner, demokratis dan tidak diskriminatif;
23. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiah, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan dan edukasi publik.
24. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuhkan life skill, work skill, dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan siswa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Menurunnya angka putus sekolah
2. Meningkatnya mutu lulusan
3. Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru
4. Mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, saling menghormati, dan sesuai Standar Pendidikan Nasional.
5. Menjalankan pembelajaran yang menggunakan konsep student centred learning, integrated subject, dan adaptable sesuai tuntutan era industri 4.0, namun dengan tetap mengedepankan karakter mulia dan nasionalisme.
6. Menghidupkan kegiatan Lesson Study Berbasis Sekolah (assessment – plan- do – reflection, kembali ke assessment, dst) bagi setiap guru agar kemampuan mereka dalam membuat perencanaan mengajar dan memberi pembelajaran di kelas mampu meningkatkan pemahaman dan keunggulan siswa.
7. Mengembangkan perangkat penilaian di sekolah yang lebih menghargai keunikan bakat dan minat setiap murid sekolah.
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan pendidikan
9. Meningkatnya sarana prasarana belajar mengajar
10. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah (daya tampung)
11. Menurunnya angka buta aksara

## RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

12. Menurunnya angka depresi pada anak
13. Menurunnya angka stunting pada anak
14. Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan
15. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan setara standar internasional
16. Meningkatnya pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi sekolah
17. Meningkatnya penyelenggaraan akreditasi dan mutu pendidikan
18. Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
19. Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
20. Terlaksananya proses pendidikan SMK yang menerapkan standar sesuai kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.
21. Menjadikan Pulau Seribu sebagai pusat SMK berbasis kelautan, wisata dan perhotelan bahari, perkapalan, serta budaya lokal.
22. Berjalannya BLUD di SMK, sehingga para lulusan SMK memiliki kemampuan dan etos kerja industri yang akan memudahkan mereka diserap oleh pasar kerja.
23. Mengimplementasikan sistem e-catalogue untuk semua pengadaan barang dan jasa secara konsisten dan akuntabel.
24. Berjalanya Reformasi Birokrasi di setiap lini Dinas Pendidikan, sehingga tata kelola manajemen dan keuangan berjalan dengan tepat, efektif, dan efisien, tanpa kebocoran atau penyimpangan.
25. Menjalankan penilaian kinerja berdasarkan 'kontrak target kerja' untuk setiap pejabat
26. Disdik (termasuk para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah), yang dilengkapi dengan sistem reward dan punishment.
27. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan Partisipasi Pendidikan Dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,11	13,13	13,15
		Terjaminnya Akses Dan Layanan Serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,19	11,21	11,23	11,25

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai target lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Seara garis besar terdapat tiga rumusan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas mutu dan tata kelola layanan pendidikan
3. Meningkatkan relevansi pendidikan

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan pembangunan dalam RPD 2023-2026 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2017-2022 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pelatihan Keterampilan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu, membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Idealnya guru atau pembimbing PAUD adalah lulusan D4 atau S1, namun di lapangan masih banyak guru PAUD yang tidak sesuai kualifikasi. Oleh karena itu secara bertahap dilakukan peningkatan kualifikasi pembimbing PAUD saat ini. Upaya lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidik adalah seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi tersebut meliputi:

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

- ✓ Kompetensi paedagogik (kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang partisipatif dan logis).
- ✓ Kompetensi kepribadian (kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta baerakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik.)
- ✓ Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.)
- ✓ Kompetensi profesional (merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam.)

Peningkatan mutu pendidikan harus diawali dari guru yang profesional, kurikulum yang bagus, penggunaan pendekatan tematik, standar kompetensi yang bermutu dan suasana yang kondusif. Berawal dari pemilihan pendidik yang profesional, sebab apalah artinya kurikulum yang hebat sarana prasarana yang lengkap namun ditangani oleh pendidik yang tidak kompeten, pasti akan menuai kegagalan. Guru merupakan ujung tombak pendidikan, guru yang berkualitas didukung dengan kurikulum yang bagus maka akan melahirkan anak-anak yang hebat dan tercapai cita-cita dalam pembentukan insan kamil. Kurikulum berkenaan dengan filosofi pendidikan anak, landasan berpikir dalam pemilihan materi untuk anak, program dan suasana belajar didalam maupun luar kelas, strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, media sarana prasarana, evaluasi dan assesmen serta kerjasama antar guru, orang tua dan masyarakat sekitar.

Paradigma pembelajaran PAUD haruslah berdasarkan *Childhood care* yaitu Ini bertujuan pada pengembangan holistik kebutuhan sosial, emosional, kognitif dan fisik anak untuk membangun landasan yang kokoh dan luas untuk pembelajaran dan kesejahteraan seumur hidup. Berbagai aspek perkembangan anak bersifat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, ketika anak termotivasi untuk melakukan hal tertentu, mereka menggunakan segala potensinya yaitu antara lain dengan menalar, mengungkapkannya secara lisan. Ketrampilan tersebut tidaklah terpisah, melainkan saling terintegrasi satusama lain secara stimulan. Hal ini berarti belajar pada anak bersifat terpadu dan saling berhubungan. Berbagai aspek perkembangan anak bersifat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, ketika anak termotivasi untuk melakukan hal tertentu, mereka menggunakan segala potensinya yaitu antara lain dengan menalar, mengungkapkannya secara lisan. Ketrampilan tersebut tidaklah terpisah, melainkan saling terintegrasi satusama lain secara stimulan. Hal ini berarti belajar pada anak bersifat terpadu dan saling berhubungan. Suasana kelas yang kondusif yang jauh dari rasa was-was dan ketakutan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pendidikan itu sendiri. Untuk itu guru harus dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman dari rasa takut, dari ancaman yang merusak pendidikan anak itu sendiri. Kesenangan anak didik untuk bersekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekolah maka pengaturan lingkungan, alat permainan pada khususnya dan sumber belajar pada umumnya harus rapi, menarik, dan dengan efisiensi yang tinggi sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh anak.

## 2. Pemberian Biaya Operasional dan Biaya Personal Pendidikan

Semua anggota masyarakat, bersama dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus mengelola dan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga diperlukan adanya kebersamaan dalam pelayanan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sumber daya manusia dalam mencapai cita-cita dan menjadikan "Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua". Sementara itu apabila kita perhatikan amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Sistem Pendidikan, pada ayat (1) pasal 5 dinyatakan bahwa "Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat", dengan demikian tersirat jangan ada lagi penduduk Jakarta hanya tamat pendidikan dasar, apalagi tingkat

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

sekolah dasar saja tidak tamat. Dengan diterbitkan Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar masyarakat Jakarta akan berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, dengan demikian pola pikir, sikap, dan pengetahuan serta keterampilannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya tamatan pendidikan dasar.

Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pada jenjang pendidikan dasar seluruh sekolah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan sekolah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.
- b. Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh sekolah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan sekolah standar (reguler)
- c. Untuk SMA/SMK/MA Swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan BOP yang diperuntukan bagi siswa yang tidak mampu sebanyak 20% dari jumlah siswa sekolah swasta.

Dinas Pendidikan juga tetap mengeluarkan kebijakan Kartu Jakarta Pinta Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan. Program KJP Plus untuk periode 2023-2026 akan melakukan langkah-langkah agar bantuan biaya pendidikan bisa tepat sasaran menasar kelompok-kelompok miskin dan sangat miskin. Selain itu Dinas Pendidikan akan melakukan kerjasama mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Dinas Sosial. *Tracking* anak tidak sekolah (ATS) juga dilakukan sebagai upaya untuk intervensi kepada keluarga yang anaknya belum mendapatkan atau tidak mau mendapatkan akses pendidikan.

Kebijakan KJMU juga tetap akan dilaksanakan. Saat ini besaran kebijakan KJMU masih sama rata di setiap wilayah dan belum ada kajian mengenai kelayakan dan keadilan besaran KJMU di setiap wilayah dan Universitas. Untuk hal itu Dinas Pendidikan akan melakukan kajian mengenai besaran KJMU agar prinsip keadilan dan efektifitas anggaran dapat tercapai. Selama tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan menargetkan peningkatan jumlah penerima KJMU dan Universitas yang bekerja sama, hal ini untuk mendorong meluasnya akses pendidikan bagi anak-anak DKI Jakarta yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

### 3. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan berkembang begitu pesat sehingga menuntut setiap orang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk didalamnya anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan anak yang membutuhkan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. Inklusi dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan.

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari system pendidikan biasa untuk mendidik semua anak. Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam setting pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

- Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non formal dan sistem informal
- Menghargai bahwa semua anak dapat belajar
- Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak
- Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan.
- Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya
- Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif

#### 4. Peningkatan Mutu Dan Relevansi Lulusan Untuk Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi Maupun Kesiapan Memasuki Pasar Kerja

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Manajemen sekolah berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang nonakademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan harian, ulangan semester, US (Ujian Sekolah) atau UNBK (Ujian Nasional Berbasis Kompetensi). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Pada jenjang SMK, Dinas Pendidikan mendorong pembentukan BLUD bagi sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola aset dan manajemen sumber daya manusia. Hal ini

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

bertujuan agar SMK dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Dinas Pendidikan membantu persiapan dan memfasilitasi SMK di DKI Jakarta untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Dalam konteks ini SMK harus merubah paradigmanya dari yang *supply driven*, menjadi *demand driven*. Hal ini agar lulusan yang dihasilkan benar-benar yang dibutuhkan oleh DUDI. Revitalisasi SMK bertujuan agar SMK dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagai upaya dalam sinkronisasi kurikulum dan materi ajar SMK agar lulusan-lulusan SMK relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Relevansi lulusan SMK menjadi program penting agar menjamin tingkat penyerapan lulusan SMK tercapai. Dalam menunjang program ini, Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi agar peserta didik memiliki sertifikasi keahlian yang dapat di terima di dunia kerja dan industri.

## 5. Peningkatan Kompetensi, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, guru harus profesional dan bermartabat. Hal ini dimaksudkan agar guru melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat.

Perwujudan impian ini tidak seperti membalik telapak tangan, namun perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru. Pemerintah secara resmi telah mencanangkan bahwa profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena guru sebagai agen pembelajaran merupakan ujung tombak peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas yang akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui uji sertifikasi dan memiliki kompetensi minimal S-1. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ditegaskan lagi oleh UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 ayat (1), bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui program penyeteraan S1 dan sertifikasi. Selain melalui penyeteraan S1 dan

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

sertifikasi, Dinas Pendidikan juga mendorong dan memfasilitasi guru-guru untuk menjadi guru penggerak di sekolahnya.

## 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di DKI Jakarta masih terdapat sekolah yang rusak walaupun secara bertahap dilakukan rehabilitasi total, rehabilitasi berat terhadap sekolah-sekolah yang rawan ambruk. Rehabilitasi dilakukan menurut skala prioritas berdasarkan analisis manajemen plan. Kebijakan rehab total gedung sekolah disamping menjadikan gedung sekolah sesuai standar juga diproyeksikan untuk menambah daya tampung. Pengembangan sekolah melalui rehab total dengan cara memaksimalkan lahan yang ada di sekolah lama melalui pengembangan/pembangunan secara vertikal sehingga penambahan ruang kelas sangat dimungkinkan.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga untuk menjamin standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan terpenuhi. Dalam rangka pemenuhan gedung dan ruang kelas sekolah Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan daya tampung dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, dan kerusakan bangunan.

## 7. Program Stunting dan Kesehatan Mental Anak

Di DKI Jakarta masih terdapat angka prevalensi stunting yang cukup besar. Dinas pendidikan dalam menghadapi masalah tersebut dengan memberikan pemberian makan tambahan anak sekolah (PMT-AS) pada jenjang PAUD dan sekolah dasar. Kebijakan pemberian PMT-AS merupakan kebijakan yang holistik dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya bersama untuk menurunkan angka stunting di DKI Jakarta. Selain program pencegahan stunting Dinas Pendidikan juga memiliki perhatian pada kesehatan mental anak. Anak-anak merupakan termasuk kelompok yang rentan terhadap kesehatan mental. Screening kesehatan mental dilakukan sebagai upaya deteksi oleh sekolah untuk mengurangi resiko gangguan mental pada anak.

Dinas Pendidikan akan melakukan upaya untuk melakukan pendampingan bagi anak-anak yang memiliki masalah kesehatan mental. Deteksi dini dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengidentifikasi anak-anak yang mengalami penurunan kualitas pembelajaran, dan perubahan sifat di sekolah. Dalam melakukan screening Dinas Pendidikan akan bekerja sama dengan para pakar psikolog dan psikiater anak yang membantu sekolah dalam mendampingi dan mengidentifikasi kesehatan mental anak.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dinas Pendidikan berkomitmen melaksanakan pembangunan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semuaarganya dengan pelayanan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pelayanan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan, Dinas Pendidikan menyusun rencana program dan kegiatan serta pendanaan prioritas yang diwujudkan melalui peningkatan akses pendidikan di semua jenjang melalui KJP Plus dan KJMU, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerjasama dunia usaha dan dunia industri, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan usia dini, dan penyelenggaraan sekolah kolaborasi, yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Melalui program prioritas KJP Plus, Dinas Pendidikan telah melakukan perluasan jangkauan penerima KJP Plus selain siswa dari keluarga tidak mampu tapi juga menysasar anak panti, anak supir JakLingko, dan pemegang kartu pekerja. Penerima KJP Plus bukan hanya untuk pendidikan formal, namun juga untuk pendidikan non-formal seperti PKBM dan lembaga pelatihan. Dalam memastikan ketepatan sasaran penerima KJP akan dilaksanakan evaluasi setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2026, ditargetkan jumlah peserta didik yang menerima KJP Plus secara berturut-turut adalah sebesar 844.166 orang pada tahun 2023, 857.219 orang pada tahun 2024, 857.219 orang pada tahun 2025, dan 857.219 orang pada tahun 2026.

Untuk meningkatkan harapan lama sekolah (HLS), Dinas Pendidikan memiliki kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik yang merupakan pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan biaya pendidikan bagi calon/mahasiswa PTN dan PTS yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik yang baik untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan meliputi biaya penyelenggaraan pendidikan seperti biaya yang dikelola kampus dan bantuan biaya hidup seperti biaya buku, makanan, transportasi, perlengkapan/peralatan, maupun biaya pendukung personal lainnya. Pada tahun 2021 terdapat 11.812 peserta didik tidak mampu yang sudah menerima manfaat KJMU; di masa depan jumlah tersebut ditargetkan untuk meningkat secara berturut-turut menjadi 17.994 mahasiswa (2023), 20.456 mahasiswa (2024), 23.164 mahasiswa (2025), dan 26.143 mahasiswa (2026).

Dalam rangka perluasan dan peningkatan akses pendidikan, telah diprioritaskan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Peningkatan daya tampung dilaksanakan melalui pembangunan gedung sekolah dan/atau penambahan ruang kelas baru, yang difokuskan pada jenjang SMP, SMA dan SMK. Untuk rehabilitasi berat dan total akan diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan pada Maret 2022 masih terdapat 227 sekolah dari total 2007 sekolah negeri di Jakarta yang mengalami kerusakan berat. Melalui rehabilitasi tersebut diharapkan jumlah gedung sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan dapat meningkat sejumlah 27 gedung pada tahun 2023, 47 gedung pada tahun 2024, 50 gedung pada tahun 2025, dan 51 gedung pada tahun 2026.

Upaya revitalisasi SMK sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dilakukan Dinas Pendidikan melalui beberapa kegiatan prioritas. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat penyerapan lulusan SMK sebanyak 30% pada tahun 2023, 35% pada tahun 2024, 45% pada tahun 2025, dan 55% pada tahun 2026. Kegiatan yang direncanakan meliputi mewujudkan SMK Pusat Keunggulan, kedepannya ditargetkan jumlah SMK yang memiliki kelas industri adalah sebanyak 27 SMK pada tahun 2023, 33 SMK tahun 2024, 38 SMK tahun 2025, dan 43 SMK tahun 2026. Selain itu untuk Pemerintah mendorong bertambahnya jumlah link and match SMK dengan

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

DUDI, dengan target sebanyak 20 SMK pada tahun 2023, 25 SMK pada tahun 2024, 30 SMK pada tahun 2025, dan 35 SMK pada tahun 2026. Selain itu dilakukan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan antara lain, membuat peta jalan pengembangan SMK; pengembangan dan penyelarasan kurikulum; kerja sama sekolah dengan DUDI dan perguruan tinggi; dan inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan SMK, dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah yang profesional, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu Dinas Pendidikan melakukan kegiatan mendorong dan memfasilitasi SMK untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Ditargetkan pada tahun 2023-2026 jumlah sekolah yang menerapkan PPK-BLUD ini dapat terus meningkat yaitu sebanyak 25 sekolah pada tahun 2023, 30 sekolah di tahun 2025, 35 sekolah di tahun 2025 hingga 40 sekolah di tahun 2026. Diharapkan dengan terbentuk SMK BLUD, sekolah dapat dengan mudah mendapatkan sumber dana melalui kegiatan usahanya dan melalui pendapatan tersebut sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

Program peningkatan profesionalisme guru ditujukan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Dinas Pendidikan menyadari bahwa ujung tombak pendidikan terdapat pada guru-guru disekolah. Oleh karena itu telah direncanakan kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme guru, seperti fasilitasi dan pelatihan untuk persiapan sertifikasi PPG, memfasilitasi program guru penggerak dari Kemendikbudristek, memperkuat peran musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), pengembangan aplikasi pembelajaran bagi pendidik, dan pemetaan kebutuhan guru sesuai dengan kompetensinya. Peningkatan profesionalisme guru juga harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru, terutama untuk sekolah swasta dan madrasah. Dinas Pendidikan memastikan peningkatan kesejahteraan guru swasta tersebut, salah satunya melalui program hibah yang efektivitasnya akan terus dikaji lebih lanjut.

Pada BAB II telah dijelaskan mengenai kondisi APK PAUD yang masih sangat rendah, untuk itu Dinas Pendidikan telah merencanakan kegiatan prioritas untuk peningkatan akses PAUD. Dinas Pendidikan akan menyusun peta jalan PAUD yang meliputi rencana pendirian PAUD di berbagai lokasi dan pemberian tunjangan kesejahteraan guru PAUD. Ke depannya, ditargetkan 100% anak usia 5-6 tahun telah mengikuti pendidikan dan tersedia 17.257 pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan menganalisis data sebaran layanan PAUD di Jakarta dan sosialisasi tentang program minimal 1 tahun PAUD sebelum SD.

Kegiatan prioritas lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, telah dilaksanakannya Jakarta Sekolah Kolaborasi (JSK). Kegiatan ini bekerjasama dengan banyak stakeholder mulai dari satuan pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, perguruan tinggi, dan sektor swasta. JSK meliputi pertukaran akses terhadap fasilitas pembelajaran, termasuk sumber belajar, laboratorium, dan sarana olahraga. Kegiatan kesiswaan kolaborasi meliputi kegiatan ekstrakurikuler, peringatan hari besar nasional, dan perayaan hari besar keagamaan. Infrastruktur yang termasuk dalam sekolah kolaborasi yaitu lapangan olahraga, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, perpustakaan, dan laboratorium TIK. Dinas Pendidikan merencanakan kolaborasi untuk diperluas dan disempurnakan dengan cara updating data calon sekolah berdasarkan nilai mutu dan pemenuhan akses, evaluasi pelaksanaan, dan pembuatan SOP atau petunjuk teknis bagi sekolah yang bisa mendapatkan intervensi program. Diharapkan terjadi peningkatan jumlah pasangan sekolah kolaborasi pada jenjang SMP, SMA dan SMK yaitu menjadi 85 pasang pada tahun 2023, 100 pasang pada tahun 2024, 130 pasang pada tahun 2025 hingga 170 pasang pada tahun 2026. Selain itu ditargetkan pula penambahan kolaborator eksternal pada tahun 2023 sebanyak 10 kolaborator, tahun 2024 16 kolaborator, tahun 2025 24 kolaborator dan tahun 2026 sebanyak 30 kolaborator.

Berdasarkan uraian di atas, maka program prioritas 2023-2026 yang mendukung sasaran ini adalah: Program Pengelolaan Pendidikan yang di jabarkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.1	MERATANYA KESEMPATAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA DISERTAI EDUKASI PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT															
1	PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DAN KUALITAS SERTA RELEVANSI HASIL PEMBELAJARAN	HARAPAN LAMA SEKOLAH	Tahun	13,07	13,09	20.006.868.5 24.603	13,11	20.018.775.8 59.657	13,13	19.731.172.2 58.948	13,15	19.589.815.2 59.639	13,15	79.346.631.9 02.847		
1.1	TERJAMINNYA AKSES DAN LAYANAN SERTA PERBAIKAN TATA KELOLA PENDIDIKAN	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	Tahun	11,17	11,19	20.006.868.5 24.603	11,21	20.018.775.8 59.657	11,23	19.731.172.2 58.948	11,25	19.589.815.2 59.639	11,25	79.346.631.9 02.847		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	9.308.465.46 3.623	4	9.020.609.03 2.409	4	8.822.415.55 8.709	4	8.626.116.53 7.194	4	35.777.606.5 91.935	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	522.643.350	100	656.139.300	100	534.425.400	100	681.888.100	100	2.395.096.150	SEKRETARIAT BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	386.378.995	9	519.874.945	9	398.161.045	9	545.623.745	9	1.850.038.730	SEKRETARIAT BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	136.264.355	1	136.264.355	1	136.264.355	1	136.264.355	1	545.057.420	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	9.060.893.54 4.900	4	8.860.897.78 1.600	4	8.660.905.31 8.170	4	8.460.906.97 0.397	4	35.043.603.6 15.067	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	30189	40346	9.060.711.50 7.000	38346	8.860.711.50 7.000	36346	8.660.711.50 7.000	34346	8.460.711.50 7.000	34346	35.042.846.0 28.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	521	521	182.037.900	521	186.274.600	521	193.811.170	521	195.463.397	521	757.587.067	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	4	4	1.248.946.05 0	4	1.146.292.95 0	4	1.112.075.25 0	4	1.214.728.35 0	4	4.722.042.60 0	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1.248.946.05 0	1	1.146.292.95 0	1	1.112.075.25 0	1	1.214.728.35 0	1	4.722.042.60 0	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	60.454.301.2 05	4	61.848.691.1 89	4	62.550.368.1 71	4	63.164.771.7 07	4	248.018.132. 272	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	1.046.853.47 8	15	1.145.044.17 2	15	1.277.531.43 3	15	1.210.539.38 1	15	4.679.968.46 4	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	58	58	15.321.765.3 49	58	15.906.109.0 74	58	15.255.584.9 60	58	15.796.260.8 04	58	62.279.720.1 87	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUJKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUJKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP				
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
																	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	325.161.617	5	325.161.617	5	325.161.617	5	325.161.617	5	1.300.646.46 8	SEKRETARIAT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA		
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	31	31	17.283.355.6 18	31	17.310.774.5 62	31	17.878.312.4 24	31	17.873.876.8 52	31	70.346.319.4 56	SEKRETARIAT  BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA		



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS  BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN  PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	28	29	1.213.754.09 7	29	1.287.251.35 2	29	1.323.436.36 5	29	1.412.573.34 5	29	5.237.015.15 9	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SJKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	9	9	336.037.850	9	369.948.756	9	367.368.195	9	371.685.078	9	1.445.039.879	SEKRETARIAT PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	44	44	17.283.355.618	44	17.310.774.562	44	17.878.312.424	44	17.873.876.852	44	70.346.319.456	SEKRETARIAT  PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	4.654.805.33 4	6	4.654.805.33 4	6	4.654.805.33 4	6	4.654.805.33 4	6	18.619.221.36	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DKI JAKARTA
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	2.989.212.24 4	1	3.538.821.76 0	1	3.589.855.41 9	1	3.645.992.44 4	4	13.763.881.8 67	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	4	4	3.050.187.68 7	4	2.875.156.07 2	4	2.917.737.09 7	4	2.964.576.22 5	4	11.807.657.0 81	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	93	93	2.663.087.45 7	93	2.449.345.81 9	93	2.449.345.81 9	93	2.449.345.81 9	93	10.011.124.9 14	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	387.100.230	1	425.810.253	1	468.391.278	1	515.230.406	1	1.796.532.167	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	54.980.753.677	4	56.094.109.057	4	57.541.917.267	4	59.035.570.399	4	227.652.350.400	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	25	25	17.625.042.508	25	17.676.486.775	25	17.733.075.469	25	17.795.323.032	25	70.829.927.784	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	75	75	18.835.944.5 91	75	19.707.439.3 48	75	20.581.448.5 09	75	21.443.922.6 87	75	80.568.755.1 35	SEKRETARIAT  PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	43	43	2.857.750.96 2	43	2.882.752.96 2	43	2.988.116.05 8	43	3.104.015.46 4	43	11.832.635.4 46	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	23	23	15.662.015,6 16	23	15.827.429,9 72	23	16.239.277,2 31	23	16.692.309,2 16	23	64.421.032,0 35	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	123.919.606. 339	4	33.478.805.9 17	4	33.053.971.6 16	4	34.109.231.4 21	4	224.561.615. 293	SEKRETARIAT PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA  BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	412.553.421	35	424.218.403	35	401.514.545	35	423.656.201	35	1.661.942.57 0	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SJKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	29	29	140.202.403	29	140.202.403	40	180.000.000	40	180.000.000	40	640.404.806	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	921	921	1.777.638.965	921	1.833.872.628	940	1.908.210.345	940	1.988.238.352	940	7.507.960.290	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	65	65	115.128.325. 362	65	24.438.204.4 83	65	24.627.484.0 54	65	25.502.683.5 96	65	189.696.697. 495	SEKRETARIAT BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	39	39	5.795.145.10 2	39	5.879.783.65 8	39	5.778.229.60 7	39	5.853.656.24 6	39	23.306.814.6 13	SEKRETARIAT  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	279	279	665.741.086	279	762.524.342	279	158.533.065	279	160.997.026	279	1.747.795.519	SEKRETARIAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Indeks	4	4	3.395.480.41 5	4	3.612.056.32 4	4	3.799.745.73 8	4	4.038.800.59 5	4	14.846.083.0 72	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	DKI JAKARTA
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	10	20	3.395.480.41 5	24	3.612.056.32 4	24	3.799.745.73 8	24	4.038.800.59 5	24	14.846.083.0 72	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	DKI JAKARTA
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	80,97	100	10.698.403.0 60.980	100	10.998.166.8 27.248	100	10.908.756.7 00.239	100	10.963.698.7 22.445	100	43.569.025.3 10.912	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	38,65	100		100		100		100		100			



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	22,54	30		35		45		55		55		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	36,38	100		100		100		100		100			



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99,1	100		100		100		100		100		BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
		Persentase guru profesional	Persentase	86,3	87,4		88,5		89,6		90,7		90,7		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,18	72,37		72,56		72,75		72,94		72,94			
																PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT
																PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
																PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
																BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
																BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
																BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
																SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS
																SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS
																SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
																SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT
																SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	67,58	68,75		69,92		71,08		72,25		72,25		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS  BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS  BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	60,17	61,33		62,5		63,67		64,83		64,83			



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	81	82	1.144.896.49 7.086	83	1.182.244.69 3.072	84	1.170.370.78 1.496	85	1.168.958.88 6.564	85	4.666.470.85 8.218	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	2,15	2,3		2,32		2,34		2,36		2,36			
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,98	2,28		2,3		2,32		2,34		2,34		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat	Presentase	99,99	100		100		100		100		100		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	1	34.072.985.781	1	44.516.322.851	1	36.176.623.487	3	114.765.932.119	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	4	11.064.247.063	3	8.331.037.072	3	7.740.676.524	3	8.119.513.967	13	35.255.474.626	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3505	416	847.132.892	416	847.132.892	416	847.132.892	416	847.132.892	1664	3.388.531.568	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	1	2.037.260.903	1	2.037.260.903	1	1.028.153.903	1	1.028.153.903	4	6.130.829.612	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	1	62.926.688	1	62.926.688	1	69.219.356	1	69.219.356	4	264.292.088	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	289.199.784	11	289.199.784	11	318.119.762	11	318.119.762	11	1.214.639.092	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	58009	53346	341.119.080.000	53346	341.119.080.000	53346	341.119.080.000	53346	341.119.080.000	53346	1.364.476.320.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	345.892.138.000	103	345.892.138.000	103	318.733.738.000	103	318.733.738.000	103	1.329.251.752.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	7.415.317.065	19836	7.446.250.165	19836	7.571.187.675	19836	7.732.694.282	19836	30.165.449.187	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	2314	2314	146.777.043.140	2314	146.777.043.140	2314	146.777.043.140	2314	146.777.043.140	2314	587.108.172.560	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2745	19350	9.493.548.171	19365	9.609.784.261	19770	9.898.216.316	19980	10.159.552.191	78465	39.161.100.939	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	0	157	482.476.080	157	492.004.540	157	502.114.234	157	512.844.704	157	1.989.439.55 8	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	279.416.127. 300	379	285.267.849. 846	379	291.249.776. 843	379	297.365.170. 880	379	1.153.298.92 4.869	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	51	52	2.135.279.56 7.318	53	2.161.589.08 1.384	54	2.171.939.17 6.511	55	2.185.565.96 5.712	55	8.654.373.79 0.925	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
															BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	





TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,81	2,11		2,13		2,15		2,17		2,17			
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Presentase	71,2	77		78		79		80		80		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja	Presentase	6,75	17,42		28,09		38,75		49,72		49,72		BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK	Presentase	99,99	100		100		100		100		100		BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	1	54.116.706.813	0	0	0	0	0	0	1	54.116.706.813	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	1	54.116.706.813	1	54.116.706.813	1	54.116.706.813	3	162.350.120.439	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	2	6.575.420.762	1	3.061.609.492	1	3.240.676.524	2	5.812.513.967	6	18.690.220.745	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	5946	13.910.584.413	5946	13.910.584.413	5946	13.910.584.413	5946	13.910.584.413	23784	55.642.337.652	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	7	124.105.786	7	133.937.019	7	144.716.159	7	155.811.238	7	558.570.202	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	14	47.601.683.869	14	67.959.347.767	14	68.841.198.756	14	69.643.112.277	14	254.045.342.669	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14.976.060.3 31	14	16.065.639.8 57	14	17.270.934.1 66	14	18.595.806.4 51	14	66.908.440.8 05	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	DKI JAKARTA
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	256528	206866	1.143.592.38 6.000	206866	1.143.649.38 6.000	206866	1.143.706.38 6.000	206866	1.143.763.38 6.000	206866	4.574.711.54 4.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	93	310.257.927.198	93	310.401.552.198	93	310.257.927.198	93	310.401.552.198	93	1.241.318.958.792	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	525	577	741.800.000	577	741.800.000	577	741.800.000	577	741.800.000	577	2.967.200.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	23845	10.448.766.676	23845	10.602.130.193	23845	10.874.202.599	23845	11.215.774.463	95380	43.140.873.931	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2176	2176	138.023.701.760	2176	138.023.701.760	2176	138.023.701.760	2176	138.023.701.760	2176	552.094.807.040	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	20387	13.081.331.510	20127	13.251.899.700	20487	13.085.828.100	20127	13.251.899.700	20127	52.670.959.010	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	
															SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	0	196	784.393.600	196	784.393.600	196	784.393.600	196	784.393.600	196	3.137.574.40 0	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	0	576	381.044.698. 600	576	388.886.392. 572	576	396.940.120. 423	576	405.148.922. 832	576	1.572.020.13 4.427	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DKI JAKARTA
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	71	72	82.975.880.1 64	73	82.977.255.2 82	74	82.977.255.2 82	75	82.977.255.2 82	75	331.907.646. 010	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,34	1,54		1,59		1,64		1,69		1,69		BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,51	1,81		1,86		1,91		1,96		1,96			
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asemen Nasional	Nilai	1,55	1,85		1,9		1,95		2		2		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,45	1,65		1,7		1,75		1,8		1,8		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,74	1,94		1,99		2,04		2,09		2,09		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,57	1,87		1,92		1,97		2,02		2,02		BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	3280	4.407.704.02 0	3280	4.407.704.02 0	3280	4.407.704.02 0	3280	4.407.704.02 0	13120	17.630.816.0 80	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	892	1051	969.851.400	1051	969.851.400	1051	969.851.400	1051	969.851.400	1051	3.879.405.60 0	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	13	13	18.974.400.000	13	18.974.400.000	13	18.974.400.000	13	18.974.400.000	13	75.897.600.000	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3595	3595	2.178.883.724	3595	2.178.883.724	3595	2.178.883.724	3595	2.178.883.724	3595	8.715.534.896	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	391	391	24.801.133.910	391	24.801.133.910	391	24.801.133.910	391	24.801.133.910	391	99.204.535.640	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1502	1502	1.182.652.210	1552	1.184.027.328	1552	1.184.027.328	1552	1.184.027.328	6158	4.734.734.194	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	3037	89	6.068.457.90 0	89	6.068.457.90 0	89	6.068.457.90 0	89	6.068.457.90 0	89	24.273.831.6 00	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	DKI JAKARTA
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	24.392.797.0 00	89	24.392.797.0 00	89	24.392.797.0 00	89	24.392.797.0 00	89	97.571.188.0 00	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	DKI JAKARTA
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Persentase	94	94,5	4.674.832.19 3.089	95	4.829.413.70 9.883	95,5	4.781.110.63 4.291	96	4.768.253.18 1.457	96	19.053.609.7 18.720	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	DKI JAKARTA
															BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,7	1,8		1,85		1,9		1,95		1,95		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,7	1,85		1,9		1,95		1,95		1,95		SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat	Presentase	100	100		100		100		100		100		BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	26	503.779.078. 817	35	711.702.633. 127	34	686.189.476. 973	34	671.642.882. 367	129	2.573.314,07 1.284	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	25	117.495.148.144	32	63.912.848.451	21	41.360.810.013	22	42.812.070.785	100	265.580.877.393	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	51980	19,931	50.935.639.392	19,931	50.935.639.392	19,931	50.935.639.392	19,931	50.935.639.392	19,931	203.742.557.568	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	1.391.232.360.000	414055	1.391.232.360.000	414055	1.391.232.360.000	414055	1.391.232.360.000	414055	5.564.929.440.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0		0		0		0		0		BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	3275	3275	728.934.151.025	3275	728.934.151.025	3275	728.934.151.025	3275	728.934.151.025	3275	2.915.736.604.100	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	5764	5764	2.815.823.94 2	5764	2.815.823.94 2	5764	2.815.823.94 2	5764	2.815.823.94 2	5764	11.263.295.7 68	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	12544	12544	795.708.636. 678	12544	795.708.636. 678	12544	795.708.636. 678	12544	795.708.636. 678	12544	3.182.834.54 6.712	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	53049	53049	26.511.384.077	53114	26.751.646.254	52634	26.513.765.254	53114	26.751.646.254	211911	106.528.441.839	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENSIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
1.01.02.2.01.26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	110	3,122	294.565.686.214	3,122	294.565.686.214	3,122	294.565.686.214	3,122	294.565.686.214	3,122	1.178.262.744.856	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2240	2240	762.854.284.800	2240	762.854.284.800	2240	762.854.284.800	2240	762.854.284.800	2240	3.051.417.139.200	BIDANG SEKOLAH DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Presentase	70	71	2.273.506.293.521	72	2.270.155.574.177	73	2.261.401.885.332	74	2.318.814.988.263	74	9.123.878.741.293	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,7	1,8		1,85		1,9		1,95		1,95		BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,7	1,8		1,85		1,9		1,95		1,95		BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	





TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	1	29.895.793.452	0	0	0	0	0	0	1	29.895.793.452	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	56.919.105.837	3	87.967.510.709	4	115.372.525.868	5	163.235.999.638	13	423.495.142.052	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	10	29.317.706.273	6	15.696.295.293	4	8.734.077.288	4	8.684.450.354	24	62.432.529.208	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	17020	7979	15.722.794.369	5469	15.722.794.369	5469	15.722.794.369	5469	15.722.794.369	24386	62.891.177.476	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	215165	252821	1.022.976.600.000	252822	1.022.988.600.000	252823	1.023.000.600.000	252824	1.023.012.600.000	252824	4.091.978.400.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	165308	165308	380.889.600.000	165308	380.889.600.000	165308	342.950.400.000	165308	342.950.400.000	165308	1.447.680.000.000	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	8973	8973	2.348.017.939	8973	2.364.852.631	8973	1.795.833.401	8973	1.816.203.378	8973	8.324.907.349	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	4648	4648	294.822.686. 480	4648	294.822.686. 480	4648	294.822.686. 480	4648	294.822.686. 480	4648	1.179.290.74 5.920	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	5730	28904	13.899.555.5 71	28883	14.207.273.9 84	29068	14.537.487.6 39	29338	14.942.483.7 74	116193	57.586.800.9 68	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	
															PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA BARAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK TENDIK DAN KEJURUAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	0	200	236.281.300	200	248.095.365	200	260.500.134	200	273.525.139	200	1.018.401.938	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	920	920	426.478.152. 300	935	435.247.865. 346	950	444.204.980. 153	965	453.353.845. 131	965	1.759.284.84 2.930	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	DKI JAKARTA
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD	Persentase	70,68	72,51	258.418.074. 179	74,34	345.382.477. 568	76,17	297.255.719. 781	78	311.025.517. 439	78	1.212.081.78 8.967	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA
															BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	0	1	9.305.939.23 0	4	37.755.453.1 18	4	35.246.570.9 28	5	46.689.352.9 12	14	128.997.316. 188	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	8	11.379.245.8 93	3	6.385.000.00 0	1	1.750.000.00 0	0	0	12	19.514.245.8 93	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	1835	1835	5.266.725.17 2	1835	5.266.725.17 2	1835	5.266.725.17 2	1835	5.266.725.17 2	7340	21.066.900.6 88	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6	6	36.000.000	7	42.000.000	8	48.000.000	9	54.000.000	9	180.000.000	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	139	139	1.378.026.00 0	151	1.461.361.00 0	153	1.482.011.00 0	155	1.483.071.00 0	598	5.804.469.00 0	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	7033	7033	9.574.200.00 0	7033	9.574.200.00 0	7033	9.574.200.00 0	7033	9.574.200.00 0	7033	38.296.800.0 00	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	0	17257	198.767.465.520	17257	198.767.465.520	10447	153.753.365.520	10447	153.753.365.520	10447	705.041.662.080	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19330	19330	6.902.240.534	19964	6.859.736.812	20462	6.859.549.724	20954	6.882.628.812	80710	27.504.155.882	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	2474	2474	15.748.431.100	2479	16.479.769.446	2479	17.344.992.612	2479	18.095.353.956	2479	67.668.547.114	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4030	4030	59.800.730	4030	62.790.766.5 00	4030	65.930.304.8 25	4030	69.226.820.0 67	4030	198.007.692. 122	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan	Persentase	49,64	51,44	128.494.555. 623	53,24	126.404.035. 882	55,04	143.701.247. 546	56,84	128.102.927. 728	56,84	526.702.766. 779	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS  SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT  BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM  SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	0	1	18.838.383.8 89	1	19.589.167.7 19	2	34.074.215.5 83	1	15.520.189.1 34	5	88.021.956.3 25	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	4	5.697.447.89 1	0	0	0	0	0	0	4	5.697.447.89 1	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	108	108	361.355.323	108	361.355.323	108	361.355.323	108	361.355.323	432	1.445.421.29 2	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	4018	14.464.800.0 00	4018	14.464.800.0 00	4018	14.464.800.0 00	4018	14.464.800.0 00	4018	57.859.200.0 00	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	327	7956	5.394.855.68 0	8354	5.583.564.00 0	8771	5.583.564.00 0	9210	5.583.564.00 0	9210	22.145.547.6 80	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	484	484	30.700.124.840	484	30.700.124.840	484	30.700.124.840	484	30.700.124.840	484	122.800.499.360	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3044	3044	1.314.788.000	3190	1.396.084.000	3339	1.492.800.800	3491	1.597.288.080	13064	5.800.960.880	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DKI JAKARTA
															PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	
															SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
																SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	
																BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	279	279	51.722.800.0 00	279	54.308.940.0 00	279	57.024.387.0 00	279	59.875.606.3 51	279	222.931.733. 351	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA	
															PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN		



# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah. Indikator tersebut merupakan indikator-indikator kinerja program (*outcome*) yang dirumuskan untuk mencapai tujuan umum dan sasaran umum yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Selama periode tahun 2023–2026, kinerja Dinas Pendidikan diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja program (*outcome*)

Tabel 28 Indikator Program Kerja Dinas Pendidikan

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir 2026
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	80,97	100	100	100	100	100
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	38,65	100	100	100	100	100
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	22,54	30	35	45	55	55
4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	36,38	100	100	100	100	100
5	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99,1	100	100	100	100	100
6	Persentase guru profesional	Persentase	86,3	87,4	88,5	89,6	90,7	90,7
7	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,18	72,37	72,56	72,75	72,94	72,94
8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	67,58	68,75	69,92	71,08	72,25	72,25
9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	60,17	61,33	62,50	63,67	64,83	64,83

# RENCANA STRATEGIS 2023 - 2026

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan mengacu dan selaras terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan beserta seluruh unit perangkat teknis di bawah koordinasinya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Khusus unit perangkat teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Melalui Renstra ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersama jajarannya mendeskripsikan tugas dan fungsinya ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama periode 4 (empat) tahun mendatang. Pada akhirnya, semua hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian DKI Jakarta sebagai kota pusat ekonomi-bisnis berskala global.